LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA

Tahun 2024

Bengkulu, 31 Januari 2025

Ringkasan Eksekutif

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut memegang peranan krusial dalam memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas dan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan untuk DJP.

Dengan motto *Bergerak* (bersama, gerak cepat, antikorupsi) yang telah berkibar sejak 2022, KPP Pratama Bengkulu Dua selalu tegak berdiri dalam menghadapi segala tantangan yang menerpa dan tentunya senantiasa melanjutkan langkah dan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi, KPP Pratama Bengkulu Dua tentu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, disusun manajemen risiko yang berkualitas, penguatan unit kepatuhan internal, serta komitmen tinggi dari seluruh pegawai untuk senantiasa bergerak bersama dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bengkulu Dua berhasil melampaui target penerimaan dengan capaian sebesar 100,02%%. Capaian ini menjadikan prestasi baru untuk KPP Pratama Bengkulu Dua, yaitu meraih target penerimaan 5 kali berturut-turut sejak 2020.

Dengan semangat sinergi yang berintegritas menuju kesempurnaan, pada tahun 2024, KPP Pratama Bengkulu Dua juga mendapatkan keberhasilan antara lain Kantor Pelayanan Terbaik ke-II se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Peringkat II Unit Kerja KPP dengan Penyuluhan Terbaik se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Unit Kerja KPP dengan Layanan di Luar Kantor (*extra miles*) terbanyak II se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, KPP dengan Employee Advocacy Terproduktif III, KPP dengan Penyelesaian Kegiatan Pengamatan Terbaik III, dan Nilai Kinerja Organisasi 108,97%.

Laporan Kinerja ini menyajikan tentang capaian penerimaan pajak, realisasi kinerja beserta keberhasilan, hambatan, langkah mitigasi yang telah diambil, serta rencana di masa mendatang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Harapannya, laporan kinerja ini dapat menjadi motivasi bagi KPP Pratama Bengkulu Dua agar tetap lanjut bergerak memberikan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dan terus melakukan inovasi demi terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik.

Kota Bengkulu, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua,

Ditandatangani secara elektronik

Indera Gunawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua merupakan salah satu unit instansi vertikal Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang di dalamnya mengatur tentang perubahan nomenklatur dari sebelumnya KPP Pratama Bengkulu menjadi KPP Pratama Bengkulu Dua.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, KPP Pratama Bengkulu Dua selaku unit vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Bengkulu Dua pada tahun anggaran 2024. Penyusunan LAKIN ini juga dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bengkulu Dua menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan KPP Pratama Bengkulu Dua serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders demi perbaikan kinerja KPP Pratama Bengkulu Dua.

KPP Pratama Bengkulu Dua mengemban amanah target penerimaan sebesar Rp. 1.239.753.815.000 pada tahun 2024. Dalam melakukan pengamanan pencapaian target penerimaan, KPP Pratama Bengkulu Dua senantiasa melakukan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk rencana strategis dan target prioritas. Dalam mencapai target tahun 2024, KPP Pratama Bengkulu Dua menghadapi berbagai kendala yaitu kinerja komoditas sawit dan batubara yang belum membaik juga dirasakan di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua sehingga potensi penerimaan pajak dari komoditas sawit dan batubara menurun, kemudian penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, serta penerimaan pajak yang dipungut Bendahara Pusat-Daerah-Desa juga mengalami penurunan. Namun dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan ditambah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, KPP Pratama Bengkulu Dua dapat menjalankan amanah yang diberikan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikan sesuai wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun daerah yang menjadi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua meliputi Kota Bengkulu (meliputi Kecamatan Gading Cempaka, Selebar, Ratu Agung, Kampung Melayu dan Singaran Pati), Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan terakhir Kabupaten Kaur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk perpajakan.
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.

c. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan ataas Barang Mewah (PPnBM).
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
e. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
g. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
h. Pelaksanaan Intesifikasi dan Ekstensifikasi perpajakan.
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua dapat digambarkan sesuai dengan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I, sebagai berikut:

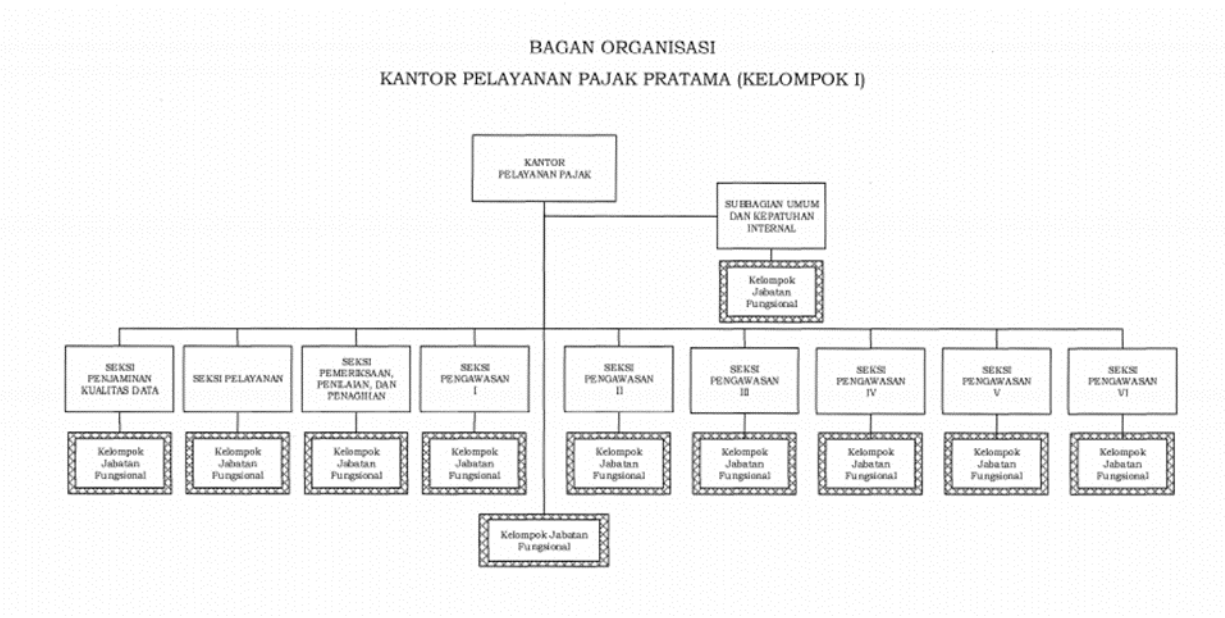

Untuk dapat menyelenggarakan/melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua mempunyai jumlah pegawai sebanyak 92 orang dengan struktur organisasi yang dibagi dalam 14 sub bagian/ seksi serta kelompok jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan peran sesuai bidangnya masing-masing.

Dalam menyelenggarakan Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya di bidang perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua dibantu dua kantor instansi vertikal di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Manna dan KP2KP Bintuhan.

Berikut komposisi sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua yang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua Berdasarkan Jabatan		
No.	**Jabatan**	**Jumlah Pegawai**
1.	Pelaksana	29 Pegawai
2.	Administrator Sistem	3 Pegawai
3.	Bendaharawan	1 Pegawai
4.	Sekretaris	1 Pegawai
5.	Juru Sita	2 Pegawai
6.	Account Representative	24 Pegawai
7.	Fungsional Pemeriksa Pajak	14 Pegawai
8.	Fungsional Penilai	1 Pegawai
9.	Fungsional Penyuluh Perpajakan	4 Pegawai
10.	Kepala Seksi	10 Pegawai
11.	Kepala KP2KP	2 Pegawai
12.	Kepala Kantor	1 Pegawai
Jumlah		92 Pegawai

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua Berdasarkan Jenjang Pendidikan		
No.	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah Pegawai**
1.	SMA/SMK	0 Pegawai
2.	Akademi (Diploma I)	16 Pegawai
3.	Akademi (Diploma III)	24 Pegawai
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	43 Pegawai
5.	Pasca Sarjana (S2)	9 Pegawai
Jumlah		92 Pegawai

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua Berdasarkan Jenis Kelamin		
No.	**Jenis Kelamin**	**Jumlah Pegawai**
1.	Laki-Laki	59 Pegawai
2.	Perempuan	33 Pegawai

Jumlah	92 Pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua berusaha bekerja secara akuntabel yaitu berusaha menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, menghindari dari berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, serta berusaha mempertanggungjawabkan kegagalan dan atau keberhasilan pencapaian visi dan misi yang diemban secara transparan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta tujuan dan harapan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.
- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan amanat yang tercantum dalam rencana strategis, prioritas nasional maupun dalam rencana kerja tahun 2024 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya, menguraikan penghargaan berupa *achievement*, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang.
- Lampiran, berisi perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Perencanaan Strategis KPP Pratama Bengkulu Dua mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) induk organisasi dikarenakan KPP Pratama Bengkulu Dua sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

I. VISI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi tersebut Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga/institusi pemerintah ingin menjadi lembaga/institusi yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dalam melakukan pengumpulan penerimaan negara dibidang perpajakan.

Maka dari itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua juga mempunyai visi Menjadi Kantor Pelayanan Pratama Terbaik untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyeleggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan.

II. MISI

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan berstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menghimpun penerimaan di bidang perpajakan dari seluruh masyarakat Indonesia guna menunjang pembiayaan pemerintah serta pembangunan bangsa dan negara. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan misi Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua juga mempunyai Misi yaitu:

1. Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:
2. Meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menghimpun penerimaan pajak; dan
3. Melaksanakan pelayanan berbasis digital untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam misi tersebut ditekankan bahwa KPP Pratama Bengkulu Dua dalam melakukan Pelayanan dan Pengawasan menggunakan sistem administrasi perpajakan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

III. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

IV. NILAI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman pada nilai-nilai:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan betindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bengkulu Dua merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Bengkulu Dua berpedoman pada Visi dan Misi DJP, Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi KPP Pratama Bengkulu Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut:

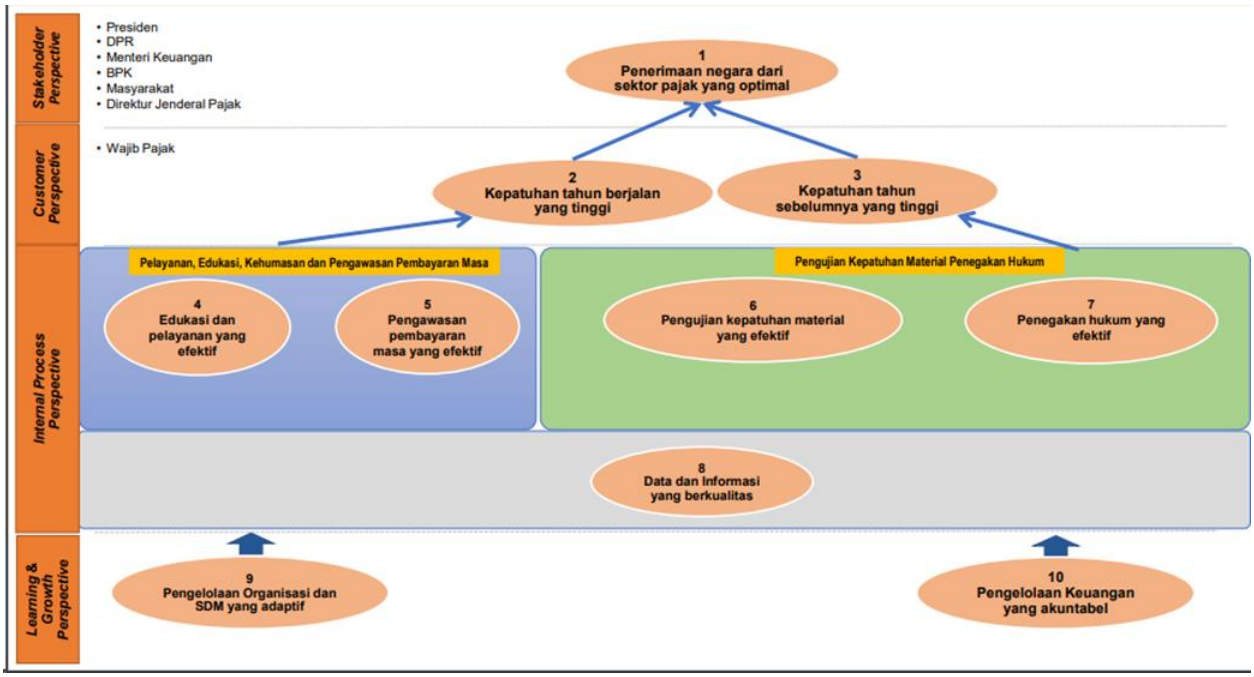

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifkasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi KPP Pratama Bengkulu Dua.

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/ KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Pada tahun 2024 KPP Pratama Bengkulu Dua telah mengirimkan Nota Dinas nomor ND-1271/KPP.2801/2024 hal Penyampaian Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* (Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua) tahun 2024 dan ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Pada PK Kemenkeu-*Three* DJP tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Stakeholder Perspective 30%			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00
Customer Perspective 20%			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%
Internal Process Perspective 25%			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan		100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,00%
Learning & Growth Perspective 25%			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00

9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00

Selain berdasarkan rencana strategis, rencana kinerja disusun dengan memperhatikan:

a. Perkembangan yang terjadi.
b. Tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran instansi, baik dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.

Penyusunan rencana kinerja merupakan kelanjutan dari rencana strategis, oleh sebab itu kegiatan pokoknya meliputi:

a. Menetapkan target setiap indikator sasaran
b. Merumuskan kegiatan
c. Meneruskan indikator kegiatan yang terdiri atas *input, output, outcomes, benefits,* dan *impacts.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis kinerja di KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024 yang dikelompokkan menurut Sasaran Strategis dan dijabarkan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective 30,00%			99,44
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			99,44
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.02%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	98.65	98,65
	Customer Perspective 20,00%			102,06
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,08
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	99.73%	99,73
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.93%	102,93
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			103,04
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	103.04%	103,04
	Internal Process Perspective 25,00%			118,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.96%	110,96
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	114.35%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,71
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120,00

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	110.14%	110.14
7	Penegakan hukum yang efektif			120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	106.86%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	96.88%	120,00
	Learning & Growth Perspective 25,00%			116,47
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,94
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	93.69	110,22
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi			108,97

Adapun analisis capaiannya adalah sebagai berikut.

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**48%**	**48%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**42,07%**	**42,07%**	**67,98%**	**67,98%**	**100,02%**	**100,02%**
Capaian	**87,65%**	**87,65%**	**90,64%**	**90,64%**	**100,02%**	**100,02%**

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan, edukasi, kehumasan, dan pengawasan

pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material dan penegakan hukum, serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

  Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

  Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	
Target penerimaan pajak	x 100%

- Realisasi IKU

  Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realiasi 2024	Realisasi 2023	Pencapaian 2024	Pencapaian 2023	Growth 2024	Growth 2023
1	PPh Non Migas	451.227.636.000	457.884.606.301	463.417.748.130	101,48%	99,84%	-1,19%	10,85%
2	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	
3	PPn dan PPNBM	748.504.424.000	739.210.407.584	631.517.373.617	98,76%	110,23%	17,05%	12,12%
4	PBB	9.135.239.000	10.323.061.960	9.523.442.027	113,00%	110,70%	8,40%	14,72%
5	Pajak Lainnya	30.886.516.000	32.629.913.225	32.666.816.940	105,64%	82,95%	-0,11%	-2,16%
Total		**1.239.753.815.000**	**1.240.047.989.070**	**1.137.125.380.714**	**100,02%**	**104,83%**	**9,05%**	**10,56%**

Sumber: Laporan realisasi KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.240.047.989.070 dengan capaian sebesar 100,02% dari target berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung nomor KEP-264/WPJ.28/2024 tanggal 31

Desember 2024 sebesar Rp 1.239.753.815.000. Realisasi tahun ini tumbuh 9,05% lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 10,56%.

Tabel penerimaan per jenis pajak Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realiasi 2023	Pencapaian 2024	Pencapaian 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan 2023
A	**PPh Non Migas**	**451.227.636.000**	**457.884.606.301**	**463.417.748.130**	**101,48%**	**99,84%**	**-1,19%**	**10,85%**
	1. PPh Pasal 21	227.027.885.000	231.507.292.486	187.573.750.582	101,97%	99,55%	23,42%	7,54%
	2. PPh Pasal 22	46.432.745.000	35.970.682.960	29.203.283.445	77,47%	51,12%	23,17%	7,40%
	3. PPh Pasal 22 Impor	-	1.683.577.049	1.705.258.100	-	0,00%	-1,27%	393,76%
	4. PPh Pasal 23	27.147.479.000	37.038.772.489	37.638.785.764	136,44%	112,69%	-1,59%	60,51%
	5. PPh Pasal 25/29 OP	6.776.556.000	7.104.884.543	8.666.117.897	104,85%	105,29%	-18,02%	180,25%
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	47.899.464.000	71.349.475.269	120.411.386.388	148,96%	204,33%	-40,75%	30,24%
	7. PPh Pasal 26	3.385.619.000	716.752.901	179.300.297	21,17%	4,30%	299,75%	17,87%
	8. PPh Final	92.557.888.000	72.310.547.653	77.850.205.331	78,12%	68,36%	-7,12%	-19,68%
	9. PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
	10. PPh Non Migas Lainnya	-	202.620.951	189.660.326	-	-	6,83%	304,66%
B	**PPn dan PPNBM**	**748.504.424.000**	**739.210.407.584**	**631.517.373.617**	**98,76%**	**110,23%**	**17,05%**	**110,23%**
	1. PPN Dalam Negeri	741.955.964.000	734.102.718.835	624.120.816.372	98,94%	109,90%	18%	109,90%
	2. PPN Impor	3.527.056.000	4.157.105.215	6.913.752.638	117,86%	256,11%	-40%	256,11%
	3. PPnBM Dalam Negeri	3.021.404.000	57.200.583	383.079.278	1,89%	165,70%	-85%	16,57%
	4. PPnBM Impor	-	721.739.195	142.702	-	-	505667%	0,00%
	5. PPN Lainnya	-	171.643.756	99.582.627	-	-	72%	0,00%
C	**PBB**	**9.135.239.000**	**10.323.061.960**	**9.523.442.027**	**113,00%**	**110,70%**	**8,40%**	**14,72%**
D	**Pajak Lainnya**	**30.886.516.000**	**32.629.913.225**	**32.666.816.940**	**105,64%**	**82,95%**	**-0,11%**	**-2,16%**
Total		**1.239.753.815.000**	**1.240.047.989.070**	**1.137.125.380.714**	**100,02%**	**104,84%**	**9,05%**	**10,56%**

Sumber: Laporan realisasi KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Total penerimaan pajak tumbuh positif pada periode ini sebesar 9,05%. Kelompok PPN dan PPnBM bertumbuh positif 17,05%, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 734.102.718.835 (*growth* 18%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 231.507.292.486 (*growth* 23,42%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 71.349.475.269 (*growth* –40,75%), dan PPh Final sebesar Rp 72.310.547.653 (*growth* – 7,12%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	102,21%	104,35%	125,74%	104,83%	100,02%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan oajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komoditas sawit dan batubara yang belum membaik juga dirasakan di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua sehingga potensi penerimaan pajak dari komoditas sawit dan batubara menurun, kemudian penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan tahun 2024

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, serta penerimaan pajak yang dipungut Bendahara Pusat-Daerah-Desa juga mengalami penurunan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target tahun 2024 dalam Renja DJP	Target tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	-	100%	100,02%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,02%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
     Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
     a. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak strategis dan kewilayahan;
     b. Melakukan tindak lanjut DPP *outstanding* tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
     c. Mengawasi pembayaran masa dan ketepatan waktu pembayaran wajib pajak;
     d. Melakukan visit wajib pajak bendahara guna mengetahui ketersediaan keuangan daerah; dan
     e. Memastikan penyetoran PPN dan PPh kontrak pembangunan gedung sesuai *timeline.*
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
     Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

     a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
        Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
        1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
        2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
        3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
        4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
        5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
   1) Menurunnya harga komoditas batubara dan sawit;
   2) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
   3) Menurunnya setoran PPh Pasal 25 Badan; dan
   4) Menurunnya setoran pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah.

Upaya yang dilakukan organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024; dan
b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan para aktor penerimaan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas. Para actor penerimaan melaksanakan rapat bedah wajib pajak untuk melakukan analisis secara detail terkait potensi penerimaan pajak.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana Pendidikan dalam kegiatan pajak bertutur.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, membuat Daftar Prioritas Pengawasan secara optimal dan menindaklanjuti daftar tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yaitu batubara dan sawit. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, termasuk program-program yang berkaitan dengan GEDSI. Ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak,

maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang membutuhkan, seperti:

a. Pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan bagi semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.
b. Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi.
c. Perlindungan Sosial: Memperkuat program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
d. Pemberdayaan Perempuan: Mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan gender, dan memberdayakan perempuan secara ekonomi.
e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas: Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Berikut analisis lebih dalam mengenai dukungan penerimaan pajak terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan penting tersebut.

  a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
     - Pendanaan Program: Penerimaan pajak memberikan sumber pendanaan yang stabil untuk program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini dapat digunakan untuk pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi hutan, pembangunan infrastruktur tangguh iklim, dan riset terkait perubahan iklim.
     - Insentif Fiskal: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti potongan pajak atau kredit pajak, bagi perusahaan dan individu yang melakukan investasi dalam kegiatan ramah lingkungan. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam upaya mitigasi dan adaptasi.
     - Pajak Karbon: Penerapan pajak karbon dapat memberikan disinsentif bagi aktivitas yang menghasilkan emisi karbon tinggi, sehingga mendorong

peralihan ke teknologi yang lebih bersih. Pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendanai program-program lingkungan.

b. Pencegahan Stunting

- Program Gizi: Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program gizi yang komprehensif, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita, serta penyuluhan tentang gizi seimbang.
- Infrastruktur Kesehatan: Dana pajak dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga kesehatan yang memadai.
- Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan pendapatan keluarga, dapat membantu mengurangi stunting dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Kesetaraan Gender

- Pendidikan: Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas, termasuk pendidikan vokasi dan keterampilan.
- Kesehatan Reproduksi: Pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas bagi perempuan, termasuk kontrasepsi dan pelayanan antenatal.
- Pemberdayaan Ekonomi: Program-program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pemberian kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan, dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan gender.

d. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

- Program Perlindungan Sosial: Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, seperti bantuan pangan, tunjangan anak, dan program keluarga harapan.

- Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah dapat menginvestasikan dana pajak dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pemberdayaan masyarakat dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Optimalisasi DPP *outstanding* tahun 2024 dan selektif pemilihan bahan baku DPP (*mandatory*) tahun 2025 • Koordinasi ke Bendahara Pemerintah (satker) • Fokus penggalian potensi sektor usaha non prioritas sesuai dengan potensi wilayah (lokal) antara lain: - Jasa pelabuhan/angkutan laut - Jasa Pendidikan - Profesi dokter • Memanfaatkan coretax yang mulai diaplikasikan pada 1 Januari 2025, yang akan memudahkan pengawasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum.	2025

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	94,98%	94,42%	94,42%	94,95%	94,95%	98,65	98,65
Capaian	94,98%	94,42%	94,42%	94,95%	94,95%	98,65	98,65

- Deskripsi Sasaran Strategis
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pertumbuhan Bruto Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA TELUK BETUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2	PRATAMA CURUP	458,615,913,000	532,905,411,954	0	15,063,497,334	-19,216,160,854	8,097,555,867	536,850,304,301	4,560,072,878	532,290,231,423	282,291,867,029	281,620,607,739	116.06	90.18	89.01
3	PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	1,147,058,858,000	989,741,285,220	0	175,069,071,724	-72,361,999,460	71,548,900,857	1,163,997,258,341	15,429,386,658	1,148,567,871,683	999,143,394,612	995,805,053,963	100.13	16.5	15.34
4	PRATAMA NATAR	696,873,251,000	666,413,021,500	0	52,125,888,210	-13,499,400,298	12,621,940,720	717,661,450,132	20,374,403,303	697,287,046,829	616,769,042,091	614,753,812,625	100.06	16.36	13.43
5	PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	908,152,301,000	853,916,309,327	0	75,529,285,267	-14,647,509,967	14,859,744,725	929,657,829,352	20,991,510,844	908,666,318,508	800,430,227,671	779,438,928,513	100.06	16.14	16.58
6	PRATAMA KOTABUMI	721,497,819,000	703,941,816,399	0	28,026,003,075	-21,214,863,022	16,356,686,558	727,109,643,010	4,676,733,883	722,432,909,127	626,303,134,071	626,155,944,042	100.13	16.1	15.38
7	PRATAMA METRO	738,419,720,000	730,713,753,100	0	26,485,819,404	-59,846,671,212	49,467,487,288	746,820,388,580	7,155,411,055	739,664,977,525	673,592,350,334	639,918,332,496	100.17	10.87	15.59
8	PRATAMA BENGKULU DUA	1,239,753,815,000	1,088,504,031,780	0	176,343,933,049	-81,782,440,013	83,448,601,407	1,266,514,126,223	26,466,137,153	1,240,047,989,070	1,146,577,311,993	1,132,958,236,909	100.02	10.46	9.45
9	MADYA BANDAR LAMPUNG	5,054,318,509,000	5,425,222,272,546	61,574,320	33,241,331,997	-72,376,881,436	72,490,058,489	5,458,638,355,916	402,669,914,937	5,055,968,440,979	5,034,565,541,206	4,660,506,554,573	100.03	8.42	8.49
10	PRATAMA BENGKULU SATU	1,301,904,043,000	1,270,498,559,929	0	73,095,100,824	-24,464,378,989	35,108,096,601	1,354,237,378,365	52,067,348,661	1,302,170,029,704	1,410,989,622,284	1,382,780,049,010	100.02	-4.02	-5.83
	Jumlah	12,266,594,229,000	12,261,856,461,755	61,574,320	654,979,930,884	-379,410,305,251	363,999,072,512	12,901,486,734,220	554,390,919,372	12,347,095,814,848	11,590,662,491,291	11,113,937,519,870	100.66	11.31	11.10
	Jumlah		1,934,290,098,716,000	1,976,347,114,413,780	129,469,523,942,225	90,663,249,839,235	-17,682,650,452,387	17,682,650,574,842	2,196,479,888,317,695	265,667,212,985,062	1,930,812,675,332,633	2,091,496,086,392,753	1,867,826,614,885,046	99.82	5.02	3.37

Perhitungan IKU:		
Pertumbuhan Realisasi Bruto KPP Tahun berjalan	:	10,46%
Komponen Pertumbuhan Unit Kerja	**:**	**110,46%**
Pertumbuhan Realisasi Bruto KPP Tahun berjalan	:	10,46%
Pertumbuhan Realisasi Bruto Nasional Tahun Berjalan	:	5,02%
Komponen Pertumbuhan Nasional	**:**	**105,18%**
Persentase Realisasi Pertumbuhan Bruto	**:**	**107,29%**

Prognosa | Riwayat Prognosa | Input Prognosa

Prognosa Tahun 2024 Tahun..

No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	171.450.320.535	173.454.203.628	1,17 %
2.	11. November	113.136.466.487	109.911.715.701	2,85 %
3.	10. Oktober	115.203.133.000	111.930.306.167	2,84 %
4.	9. September	109.258.313.583	100.323.910.377	8,18 %
5.	8. Agustus	102.078.745.000	112.618.238.109	10,32 %
6.	7. Juli	108.747.492.333	117.377.611.731	7,94 %
7.	6. Juni	74.915.515.663	93.481.028.087	24,78 %
8.	5. Mei	106.658.581.494	89.389.064.584	16,19 %
9.	4. April	94.267.555.267	104.996.483.537	11,38 %
10.	3. Maret	66.850.030.850	86.002.834.218	28,65 %
11.	2. Februari	57.222.172.000	66.772.550.327	16,69 %
12.	1. Januari	73.495.645.000	73.790.042.604	0,40 %
	TOTAL	1.193.283.971.212	1.240.047.989.070	3,92 %

Perhitungan IKU Deviasi		
Jumlah Deviasi Penerimaan Kas Tiap Bulan	:	131,39
Jumlah Bulan	:	12
Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	:	10,95
Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	**:**	**90%**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah penambahan 50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak

bruto sebesar 107.79% dan 50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 90%, sehingga realisasinya menjadi 98,65%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	113	98,65

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini adalah IKU yang baru diterapkan pada tahun 2023. Menurunnya realisasi IKU ini pada tahun 2024 dikarenakan nilai Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas yang rendah pada semester I tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target tahun 2024 dalam Renja DJP	Target tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	98,65

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak ada di dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	98,65

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Dalam mencapai target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini, KPP Pratama Bengkulu Dua telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

  a. Validasi pemenuhan kewajiban perpajakan atas dana desa kepada Bendahara Desa.
  b. Monitoring dan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan bendahara yang diindikasikan tidak menyetor pajak sesuai dengan ketentuan.
  c. Pengawasan kepatuhan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan.
  d. Melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa serta penelitian terhadap kewajaran pembayarannya terhadap seluruh Wajib Pajak.
  e. Melakukan pembahasan prognosa penerimaan bulanan melalui rapat bersama seluruh aktor pengampu penerimaan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

  Adapun penyebab kegagalan/penurunan kinerja IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

  a. Sulitnya memprediksi setoran bulanan Wajib Pajak, dengan alasan masih terdapat faktur pajak masukan yang diterima pada saat-saat akhir periode pembuatan SPT Masa PPN

b. Wajib pajak bendahara (satker) tidak memiliki sarana pengawasan untuk memperkirakan pencairan SP2D.

Solusi yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

a. Kegiatan penggalian potensi pajak pada Wajib Pajak terpilih dengan kontribusi penerimaan yang dominan.
b. Melakukan percepatan tindak lanjut penyelesaian DPP dan DSPP baik Outstanding maupun tahun berjalan.
c. Melakukan pembahasan prognosa bersama dengan para aktor pengampu penerimaan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak bruto dan mengelola deviasi proyeksi perencanaan kas. Analisis ini akan mengkaji bagaimana berbagai faktor terkait efisiensi sumber daya, seperti teknologi, SDM, dan anggaran, berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut. Langkah efisiensi yang dilakukan organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Teknologi informasi : Penggunaan data analytics untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergarap, serta mengoptimalkan penagihan pajak.
  b. Kualitas SDM: Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas perpajakan, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak hingga pengawasan dan penagihan.
  c. Alokasi Anggaran: Alokasi anggaran yang tepat dan efisien untuk kegiatan perpajakan dapat mendukung pencapaian target penerimaan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

  a. Melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa serta penelitian terhadap kewajaran pembayarannya terhadap seluruh Wajib Pajak.
  b. Melakukan pembahasan prognosa penerimaan bulanan melalui rapat bersama seluruh aktor pengampu penerimaan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Kegiatan penggalian potensi pajak akan difokuskan pada Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai WP dengan risiko kepatuhan dan dampak fiskal yang tinggi berdasarkan data *Compliance Risk Management* (CRM).
b. Melakukan kunjungan dan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK dan menindaklanjuti hasil kunjungan/konseling sesuai tindakan yang diperlukan.
c. Melakukan koordinasi dan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi DRM dalam penghitungan proyeksi perencanaan kas.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Sulitnya memprediksi setoran bulanan Wajib Pajak, dengan alasan masih terdapat faktur pajak masukan yang diterima pada saat-saat akhir periode pembuatan SPT Masa PPN. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi DRM dalam penghitungan proyeksi perencanaan kas.
  b. WP bendahara (satker) tidak memiliki sarana pengawasan untuk memperkirakan pencairan SP2D. upaya yang dilakukan adalah monitoring dan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan bendahara yang diindikasikan tidak menyetor pajak sesuai dengan ketentuan.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memberikan manfaat dalam menghitung prognosa penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal menjadikan pendapatan negara yang optimal juga. Anggaran yang baik dapat dimaksimalkan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI).

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memberikan manfaat dalam menghitung prognosa penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal menjadikan pendapatan negara yang optimal juga. Anggaran yang baik dapat dimaksimalkan dalam mendukung upaya pemerintah

dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Kegiatan penggalian potensi pajak akan difokuskan pada Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai WP dengan risiko kepatuhan dan dampak fiskal yang tinggi berdasarkan data Compliance Risk Management (CRM). • Melakukan percepatan tindak lanjut penyelesaian DPP dan DSPP baik Outstanding maupun tahun berjalan. • Memaksimalkan kegiatan KPDL dalam rangka peningkatan pembayaran pajak WP UMKM, Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) serta meningkatkan kualitas data perpajakan. • Melakukan kunjungan dan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK dan menindaklanjuti hasil kunjungan/konseling sesuai tindakan yang diperlukan. • Memaksimalkan tindakan penagihan aktif dan melakukan persuasif terhadap WP yang memiliki tunggakan besar dan LHP Disetujui yang memiliki potensi ketertagihan tinggi. • Melakukan koordinasi dan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi DRM dalam penghitungan proyeksi perencanaan kas. • Berkoordinasi dengan KPPN sehingga pencairan SPMKP sesuai jadwal.	2025

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18,82%	43,56%	43,56%	71,34%	71,34%	102,27%	99,73%
Capaian	94,10%	90,75%	90,75%	95,11%	95,11%	102,27%	99,73%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

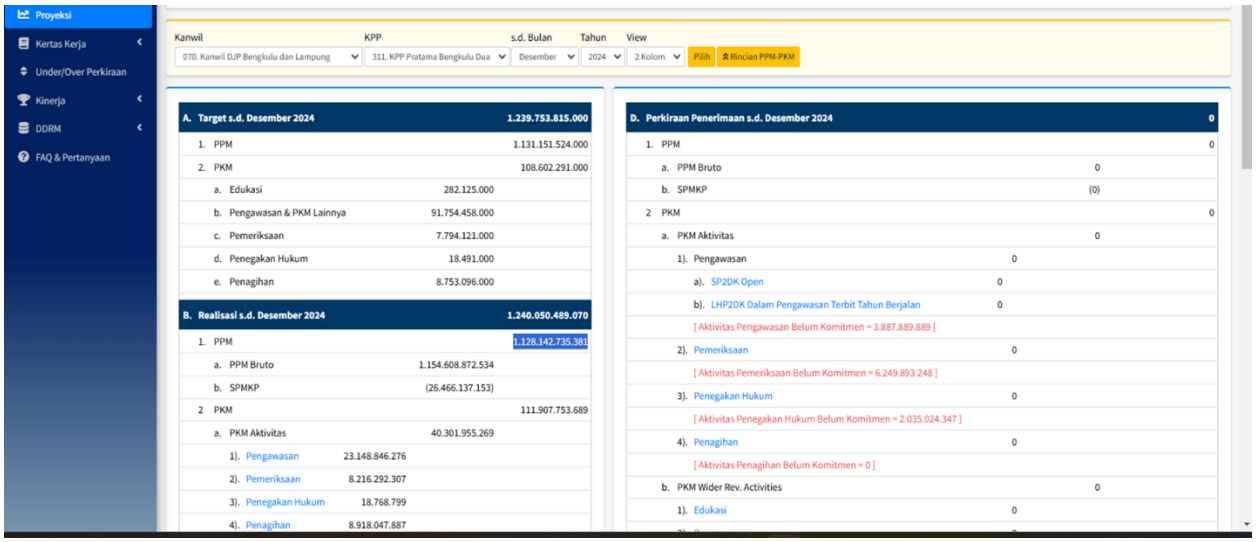

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar Rp 1.128.142.735.381 dari target Rp 1.131.151.524.000 pada tahun 2024, sehingga capaian IKU ini adalah 99,73%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	104,35%	125,96%	107,30%	99,73%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah senilai Rp 1.128.142.735.381.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target tahun 2024 dalam Renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	99,73%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Benkulu Dua Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah 99,73% sedangkan target tahun 2024 dalam renja, renstra DJP dan perjanjian kinerja adalah 100%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	99,73%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah 99,73% sedangkan target tahun 2024 dan standar nasional (APBN) adalah 100%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

     Dalam mencapai target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Melakukan pengawasan pembayaran masa melalui aplikasi yang tersedia.
     b. Melakukan konseling wajib pajak terkait kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan.
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

     Adapun penyebab kegagalan/penurunan kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya 2 jenis pajak dominan yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yaitu PPh Pasal 25/29 Badan sebesar -40,75% dan PPh Pasal 23 sebesar -1,59%.

   - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

     Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Analisis ini akan mengkaji bagaimana berbagai faktor terkait efisiensi sumber daya, seperti teknologi, SDM, dan anggaran, berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut. Langkah efisiensi yang dilakukan organisasi adalah sebagai berikut:
     a. Teknologi informasi : Penggunaan data *analytics* untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergarap, serta mengoptimalkan penagihan pajak.

b. Kualitas SDM: Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas perpajakan, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak hingga pengawasan dan penagihan.
c. Alokasi Anggaran: Alokasi anggaran yang tepat dan efisien untuk kegiatan perpajakan dapat mendukung pencapaian target penerimaan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Adapun program yang menunjang keberhasilan/kegagalan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebagai berikut:

  a. Melaksanakan fokus penggalian potensi sektor usaha non prioritas sesuai dengan potensi wilayah.
  b. Melaksanakan pengawasan pembayaran masa melalui aplikasi yang tersedia.
  c. Melakukan konseling wajib pajak terkait kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Kegiatan penggalian potensi pajak akan difokuskan pada Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai WP dengan risiko kepatuhan dan dampak fiskal yang tinggi berdasarkan data *Compliance Risk Management* (CRM).
  b. Melakukan kunjungan dan konseling terhadap wajib pajak dan menindaklanjuti hasil kunjungan/konseling sesuai tindakan yang diperlukan.
  c. Melakukan koordinasi dan bedah wajib pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  Terdapat dua jenis pajak dominan yang mengalami kontraksi (pertumuhan negatif) yaitu PPh Pasal 25/29 Badan dan Pasal 23 merupakan indikator penting dari perlambatan ekonomi atau perubahan signifikan dalam aktivitas bisnis. Secara keseluruhan, kontraksi kedua jenis pajak ini mencerminkan kondisi ekonomi yang

kurang menguntungkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Penerimaan pajak yang optimal menjadikan pendapatan negara yang optimal juga. Anggaran yang baik dapat dimaksimalkan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI).
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Penerimaan pajak yang optimal menjadikan pendapatan negara yang optimal juga. Anggaran yang baik dapat dimaksimalkan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Pengawasan pembayaran masa dan ketepatan waktu pembayaran Wajib Pajak. • Visit Wajib Pajak penentu penerimaan guna mengetahui profil Wajib Pajak. • Visit Wajib Pajak baru yang memiliki setoran besar tahun 2024 • Pengawasan pembayaran setoran PPN dan PPh atas bendahara pemerintah • Penerbitan Surat Tagihan Pajak PPM • Memanfaatkan coretax yang mulai diaplikasikan pada 1 Januari 2025, yang akan memudahkan pengawasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum.	2025

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	99%	99%	100%	100%
Realisasi	73,74%	84,87%	84,87%	100,55%	100,55%	102,93%	102,93%
Capaian	122,90%	106%	106%	111,73%	111,73%	102,93%	102,93%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771 yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

- Formula IKU

$$\left[\frac{\text{(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT)} + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \text{X } 100\%$$

- Realisasi IKU

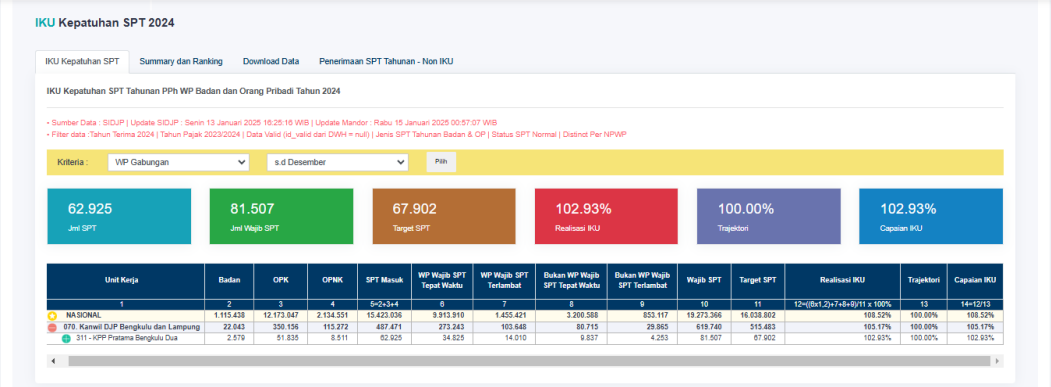

Realisasi SPT Tahunan yang masuk adalah sebanyak 62.925 SPT dari target SPT sebanyak 67.902 SPT Tahunan. Dengan penghitungan sesuai dengan formula IKU, capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menjadi sebesar 102,93%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	103,39%	120,58%	104,93%	102,93%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 102,93%. KPP Pratama Bengkulu Dua telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan, seperti e-filing dan melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, tentang pentingnya pajak dan kemudahan dalam melaporkan SPT.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100%	102,93%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat di dalam dokumen Renja, Renstra DJP maupun RPJM. Adapun targetnya pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi sebesar 102,93%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	102,93%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat di dalam target standar nasional (APBN), Adapun realisasi IKU ini sebesar 102,93%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

     Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkulu Dua dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini adalah sebagai berikut:
     a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan, seperti e-filing;
     b. Melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, tentang pentingnya pajak dan kemudahan dalam melaporkan SPT;
     c. Menciptakan kantor pelayanan pajak yang nyaman, mudah diakses, dan menyediakan layanan prima;
     d. Melakukan penindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, namun tetap mengedepankan asas keadilan; dan
     e. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan melalui berbagai cara, seperti mengikuti seminar, workshop, atau membaca literatur terkait.
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

     Penyebab keberhasilan dalam mencapai target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi WP Badan dan OP yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh;
b. Pengiriman surat teguran dan surat imbauan;
c. Mengirimkan WA Blast dan SMS Blast;
d. Pengiriman surat himbauan penyampaian SPT Tahunan lebih awal, lebih baik;

e. Pengiriman surat ke kepala satker terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai/ASN;
f. Sosialisasi pengisian SPT baik melalui tatap muka maupun melalui Webinar; dan
g. Membuka saluran-saluran komunikasi SPT melalui WA Chat maupun Telpon.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Ada beberapa cara di mana efisiensi penggunaan sumber daya dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan:

  1. Peningkatan Kualitas Layanan:
     a. Penyederhanaan Prosedur: Dengan menyederhanakan prosedur pelaporan, baik secara manual maupun online, wajib pajak akan lebih mudah memahami dan melaksanakan kewajibannya.
     b. Peningkatan Akses: Memperluas akses wajib pajak terhadap layanan perpajakan, baik melalui kantor pelayanan, website, atau aplikasi mobile, akan memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi dan bantuan.
     c. Responsif terhadap Pertanyaan: Menyediakan layanan konsultasi yang cepat dan akurat akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak.
  2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi:
     a. Pemanfaatan Data: Memanfaatkan data yang ada untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh dan melakukan tindakan preventif.
     b. Pengembangan Aplikasi: Mengembangkan aplikasi yang user-friendly untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak.
     c. Otomatisasi Proses: Mengotomatiskan proses-proses yang berulang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan.
  3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
     a. Pelatihan dan Pengembangan: Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas pajak dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan.
     b. Motivasi: Memberikan motivasi dan insentif kepada petugas pajak agar mereka dapat bekerja secara optimal.
  4. Efektivitas Penggunaan Anggaran:
     a. Prioritas Program: Memfokuskan anggaran pada program-program yang memiliki dampak paling signifikan terhadap peningkatan kepatuhan.

b. Evaluasi Program: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini adalah melaksanakan Edukasi dan Bimbingan Teknis Penyampaian SPT Tahunan pada instansi-instansi pemerintah serta bekerja sama dengan KP2KP Bintuhan dan KP2KP Manna dalam melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Dalam mencapai target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini terdapat beberapa risiko dan cara memitigasinya sebagai berikut:

  a. Risiko rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan SPT Tahunan dimitigasi dengan Intensifikasi sosialisasi melalui berbagai media, kemitraan dengan berbagai pihak (media, organisasi masyarakat), dan penyederhanaan bahasa dalam materi sosialisasi.
  b. Risiko penolakan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan, dimitigasi dengan penegakan hukum yang tegas, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Mencapai target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan merupakan tantangan yang kompleks. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi antara lain:

  a. Kurangnya Kesadaran Pajak: Banyak wajib pajak belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan kewajiban melaporkan SPT Tahunan.
  b. Kompleksitas Peraturan: Peraturan perpajakan yang dianggap rumit dan sering berubah membuat wajib pajak kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajibannya.
  c. Beban Administratif: Proses pelaporan SPT yang dianggap berbelit dan memakan waktu seringkali menjadi penghalang bagi wajib pajak.
  d. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi di kantor pajak dapat menghambat upaya peningkatan kepatuhan.
  e. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti penurunan pendapatan, dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai langkah telah diambil, antara lain:

a. Sosialisasi dan Edukasi:
   - Kampanye Pajak: Melalui berbagai media, pemerintah secara intensif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.
   - Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan cara pelaporan SPT.

b. Penyederhanaan Prosedur:
   - E-Filing: Memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online melalui e-filing.
   - Formulir yang Lebih Sederhana: Menyederhanakan formulir SPT sehingga lebih mudah dipahami.

c. Peningkatan Layanan:
   - Call Center: Menyediakan layanan call center untuk menjawab pertanyaan wajib pajak.
   - Kantor Pelayanan Ramah: Menciptakan kantor pelayanan pajak yang nyaman dan mudah diakses.

d. Penegakan Hukum:
   - Sanksi: Memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
   - Kooperasi dengan Instansi Lain: Bekerjasama dengan instansi terkait untuk memperoleh data wajib pajak yang lebih akurat.

e. Insentif:
   - Reward: Memberikan reward bagi wajib pajak yang patuh.
   - Fasilitas Keringanan: Memberikan fasilitas keringanan bagi wajib pajak yang kesulitan memenuhi kewajibannya.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Adapun analisis pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan memperhatikan GEDSI adalah sebagai berikut:

  a. Saat pelaporan SPT Tahunan tidak ada diskriminasi gender dalam akses terhadap layanan perpajakan.

b. Penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dalam mengakses infomasi perpajakan.
c. Sistem e-filling sudah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
d. Sudah melakukan kampanye edukasi perpajakan lebih intensif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
  a. Kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan ini kemudian dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung pencapaian TPB, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, program kesehatan untuk mencegah stunting, pemberdayaan perempuan, dan program pengentasan kemiskinan.
  b. Kepatuhan pajak yang baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
  c. Kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana publik.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Tahun
• Pengiriman Surat Teguran WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan; • Penerbitan STP atas WP yang belum melaporkan SPT Tahunan dan/atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan; • Sosialisasi door to door penyampaian SPT sebagai bagian dari kegiatan KPDL; • Melaksanakan Edukasi dan Bimbingan Teknis Penyampaian SPT Tahunan berkoordinasi dengan KP2KP Manna dan KP2KP Bintuhan; • Meningkatkan peran KP2KP dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan pada wilayah kerja masing-masing KP2KP.	2025

• Memanfaatkan coretax yang mulai diaplikasikan pada 1 Januari 2025, yang akan memudahkan pengawasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum.	

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	14.37%	27.25%	27.25%	42.38%	42.38%	103.04%	103.04%
Capaian	57.48%	54.50%	54.50%	56.50%	56.50%	103.04%	103.04%

- Deskripsi Sasaran Strategis
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- Definisi IKU
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

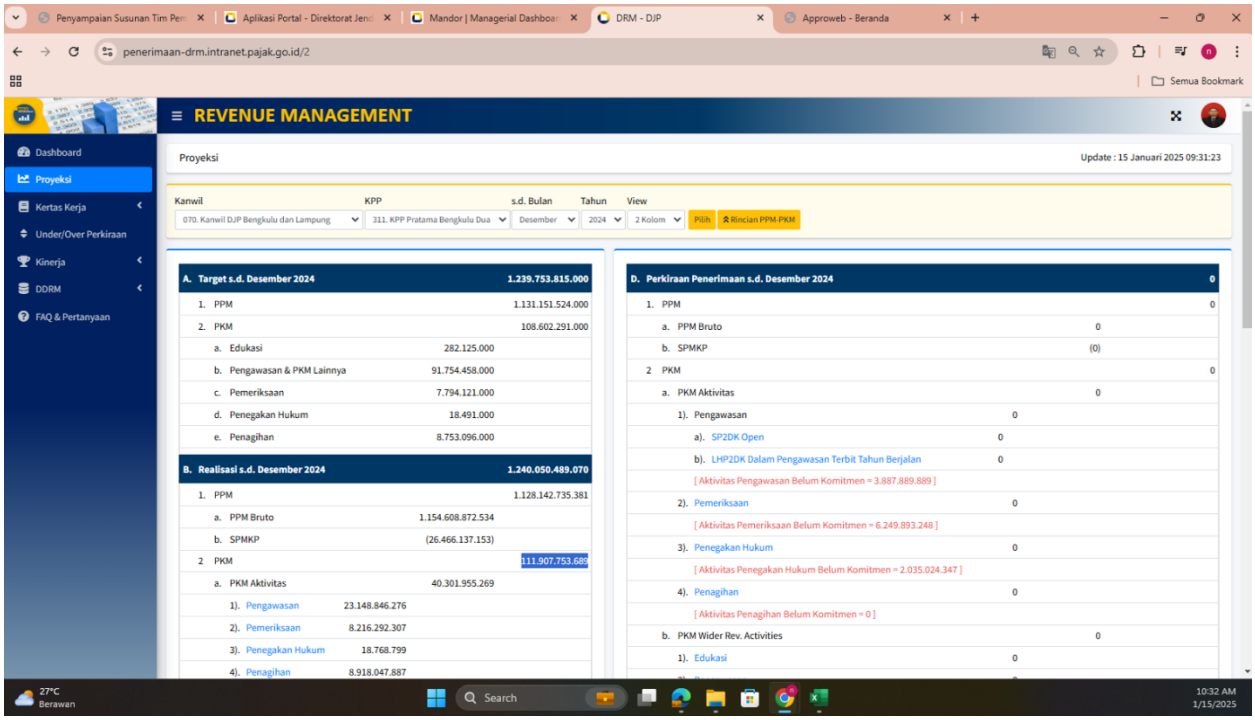

Realisasi IKU PKM pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 111.907.753.689 dari target sebesar Rp 108.602.291.000 sehingga capaian realisasinya menjadi 103,04%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	74,46%	103,04%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar 103,04% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 74.46%. Hal ini merupakan bukti upaya KPP Pratama Bengkulu Dua dalam meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target tahun 2024 dalam Renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	103,04%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Berdasarkan dokumen perencanaan Renja dan Renstra DJP Tahun 2024, target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah 100%. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 adalah 103,04%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	103,04%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif
4. PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun analisis upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bengkulu Dua dalam mencapai kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan dan tindak lanjut DPP *outstanding* maupun DPP tahun berjalan.
b. Menawarkan skema pelunasan melalui cicilan jika WP merasa berat untuk melunasi potensi pajaknya sekaligus.
c. Fokus penggalian potensi sektor usaha non prioritas sesuai dengan potensi wilayah.
d. Optimalisasi DPP *outstanding* tahun 2023 dan selektif pemilihan bahan baku DPP (*mandatory*) tahun 2024.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

  Penyebab Keberhasilan

  a. Peningkatan koordinasi antar instansi: Kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dapat memperkuat penegakan hukum perpajakan.
  b. Peningkatan kesadaran wajib pajak: Kampanye edukasi pajak yang intensif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan.
  c. Penerapan risiko berbasis: Pendekatan risiko berbasis memungkinkan petugas pajak untuk fokus pada wajib pajak dengan risiko tinggi sehingga meningkatkan efisiensi pengujian.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pegawai pajak yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengujian.
  b. Pemanfaatan teknologi informasi: Penggunaan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi dapat mempercepat proses pengujian dan meningkatkan akurasi data.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

  a. Penguatan Sistem Informasi Pajak
  b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  c. Kerjasama dengan Pihak Lain

d. Penyuluhan dan Sosialisasi
e. Penegakan Hukum yang Tegas
f. Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Mitigasi Risiko

  a. Risiko Kesalahan Manusia:
     - Tinjauan Sejawat: Melakukan tinjauan sejawat terhadap hasil kerja pegawai untuk meminimalkan kesalahan.
     - Standarisasi Prosedur: Menetapkan standar prosedur operasional yang jelas dan konsisten.
     - Pemantauan Kinerja: Melakukan pemantauan kinerja pegawai secara berkala.
  b. Risiko Hukum:
     - Konsultasi Hukum: Melakukan konsultasi hukum secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     - Dokumentasi: Melakukan dokumentasi yang lengkap dan sistematis terhadap seluruh proses pengujian.
  c. Risiko Teknis:
     - Backup Data: Melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
     - Pengujian Sistem: Melakukan pengujian sistem secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.
  d. Risiko Reputasi:
     - Transparansi: Menjaga transparansi dalam pelaksanaan tugas dan memberikan informasi yang akurat kepada publik.
     - Komunikasi: Membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak dan masyarakat.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Pengujian kepatuhan materil merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai kendala seringkali muncul dan menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Adapun kendala dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

  a. Perubahan Peraturan yang Cepat: Perubahan peraturan pajak yang sering dan kompleks membuat wajib pajak kesulitan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Teknologi: Kurangnya penggunaan teknologi yang canggih dalam proses pengujian dapat memperlambat proses kerja dan mengurangi akurasi hasil.
c. Kualitas Data yang Rendah: Kualitas data yang tidak baik dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat.
d. Kurangnya Pemahaman: Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

a. Sosialisasi yang Intensif: Melakukan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak mengenai perubahan peraturan pajak.
b. Sistem Informasi Pajak: Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pajak yang terintegrasi untuk memudahkan proses pengujian dan analisis data.
c. Kampanye Pajak: Melakukan kampanye pajak secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
d. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas pelaksanaan pengujian kepatuhan materil.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

  a. KPP Pratama Bengkulu Dua menyediakan fasilitas yang lebih mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam peraturan perpajakan dan menyediakan informasi dalam berbagai format.
  b. KPP Pratama Bengkulu Dua meningkatkan kapasitas wajib pajak melalui program edukasi yang inklusif.
  c. KPP Pratama Bengkulu Dua menerapkan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Penerimaan pajak yang optimal akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk:

  a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Melakukan investasi dalam energi bersih, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.

b. Pencegahan Stunting: Meningkatkan anggaran untuk program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi.
c. Kesetaraan Gender: Membiayai program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.
d. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Meningkatkan anggaran untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Tahun
• Optimalisasi DPP outstanding tahun 2024 dan selektif pemilihan bahan baku DPP (mandatory) tahun 2025 • Fokus penggalian potensi sektor usaha non prioritas sesuai dengan potensi wilayah (local) antara lain: - Jasa pelabuhan/angkutan laut - Jasa pendidikan - Profesi dokter • Memanfaatkan coretax yang mulai diaplikasikan pada 1 Januari 2025, yang akan memudahkan pengawasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum.	2025

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	68.73%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	222.00%	222.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- Realisasi IKU

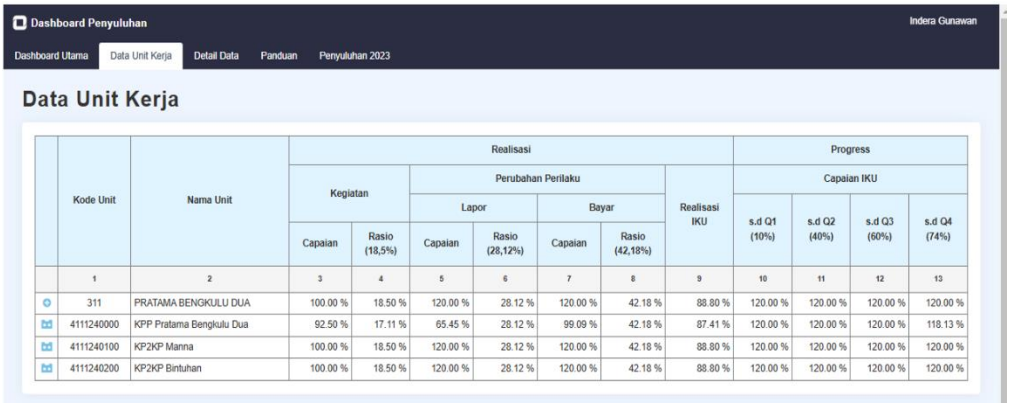

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	311	PRATAMA BENGKULU DUA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4111240000	KPP Pratama Bengkulu Dua	92.50 %	17.11 %	65.45 %	28.12 %	99.09 %	42.18 %	87.41 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	118.13 %
	4111240100	KP2KP Manna	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4111240200	KP2KP Bintuhan	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini terdiri atas tiga komponen, komponen kegiatan mencapai 18,50%, komponen Lapor mencapai 28,12%, komponen bayar mencapai 42,18% sehingga realisasi IKU ini ketika ketiga komponen tersebut dijumlahkan menjadi 88,80%. Target IKU ini sampai dengan Q4 adalag 74%, sehingga capaian IKU ini menjadi 120% ketika realisasi dibandingkan dengan targetnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan	-	-	-	84,00%	88,80%

bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan					

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU yang baru diterapkan pada tahun 2023. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2024 senilai 88,80% sedangkan realisasi tahun 2023 senilai 84,00%. Artinya, penyuluhan dan edukasi perpajakan sudah secara masif dilakukan dan terbukti hasilnya terjadi perubahan perilaku bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target tahun 2024 dalam renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74%	88,80%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Renja dan Renstra DJP serta RPJM. Adapun targetnya pada perjanjian kinerja awal tahun adalah 74% dan realisasinya adalah 88,80%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	74%	-	88,80%

edukasi dan penyuluhan			

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 adalah 88,80% dari targetnya 74,00%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

     Dalam mencapai target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, telah dilakukan berbagai upaya untuk menunjang keberhasilannya. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Bekerja sama dengan KPP Pratama Bengkulu Satu dalam melakukan Kegiatan Edukasi dengan tema tertentu;
     b. Bekerja sama dengan KPPN dalam melakukan Kegiatan Edukasi kepada WP Instansi Pemerintah;
     c. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan Kegiatan Edukasi kepada WP Koperasi dan Pelaku UMKM;
     d. Berusaha mengatur jadwal edukasi dengan efisien.
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

     Analisis keberhasilan peningkatan kinerja IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebagai berikut:
     a. Materi edukasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman wajib pajak;
     b. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami akan meningkatkan efektifitas penyampaian materi.
     c. Penggunaan berbagai metode penyuluhan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan media sosial akan menarik minat wajib pajak.
     d. Penyampaian materi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok wajib pajak akan lebih efektif.
     e. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa dalam kegiatan penyuluhan akan memperluas jangkauan.
     f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kegiatan penyuluhan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
   - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

     Efisiensi dalam konteks kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dalam hal ini, hasil yang optimal adalah perubahan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Sumber daya yang

dimaksud meliputi anggaran, tenaga kerja, waktu, dan teknologi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak antara lain:

a. Penetapan target yang jelas dan spesifik akan membantu mengarahkan penggunaan sumber daya secara efektif.
b. Metode yang dipilih harus relevan dengan karakteristik target audiens dan tujuan yang ingin dicapai.
c. Penggunaan platform e-learning dapat memperluas jangkauan dan mengurangi biaya.
d. Mengidentifikasi kelemahan dalam program untuk dilakukan perbaikan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Beberapa program/kegiatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak antara lain:

  a. Membagi wajib pajak menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristiknya (misalnya, UMKM, profesional, perusahaan besar) untuk memberikan materi yang lebih relevan.
  b. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari istilah teknis yang rumit.
  c. Memfasilitasi diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif wajib pajak.
  d. Melakukan workshop praktis untuk membantu wajib pajak memahami cara mengisi SPT dan melakukan pembayaran pajak.
  e. Menggunakan simulasi untuk memperagakan proses pelaporan dan pembayaran pajak.
  f. Menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih luas.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Meningkatkan persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pajak merupakan tujuan utama dari setiap program edukasi pajak. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. Rencana aksi berikut ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu diambil.

  Rencana aksi:

  a. Menyusun materi edukasi yang relevan, mudah dipahami, dan menarik.
  b. Menggunakan berbagai platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi.

c. Memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
d. Mendesain kantor pelayanan yang nyaman dan mudah diakses.
e. Memanfaatkan media massa untuk melakukan sosialisasi secara luas.
f. Mengadakan event-event pajak yang melibatkan masyarakat.

Mitigasi Risiko:

a. Risiko Kurangnya Anggaran dimitigasi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.
b. Risiko kurangnya SDM dimitigasi dengan memanfaatkan relawan pajak.
c. Risiko perubahan kebijakan dimitigasi dengan melakukan pemantauan terhadap perubahan kebijakan secara berkala.
d. Risiko perlawanan wajib pajak dimitigasi dengan melakukan pendekatan yang persuasif.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Untuk mencapai target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini bukanlah tanpa kendala. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi adalah:

  a. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan.
  b. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi menghambat pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan secara optimal.
  c. Mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya yang berkelanjutan.

  Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai langkah telah diambil, antara lain:

  a. Sosialisasi melalui media massa, media sosial, dan acara-acara publik.
  b. Mengintegrasikan materi pajak ke dalam kurikulum sekolah.
  c. Menyediakan layanan perpajakan terpadu.
  d. Menyederhanakan formulir SPT dan petunjuk pengisiannya.
  e. Menanggapi keluhan wajib pajak dengan cepat dan tepat.
  f. Memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan pajak.
  g. Menegakkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

KPP Pratama Bengkulu Dua senantiasa memastikan materi edukasi dan layanan pajak dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Saat melakukan sosialisasi, KPP Pratama Bengkulu Dua senantiasa menggunakan bahasa yang sederhana, tidak diskriminatif, dan mudah dipahami oleh semua kelompok. KPP Pratama Bengkulu Dua mendorong partisipasi aktif dari semua kelompok, termasuk perempuan, orang dengan disabilitas, dan kelompok marginal.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Perubahan perilaku wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, berperan penting dalam mendanai program-program yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

  Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

  a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Pajak yang terkumpul digunakan untuk mendanai penelitian, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
  b. Pencegahan Stunting: Pajak digunakan untuk membiayai program-program gizi, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita.
  c. Kesetaraan Gender: Pendanaan untuk program pendidikan, terutama bagi perempuan, untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi.
  d. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem : Pendanaan program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan bantuan pangan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Tahun
• Bekerja sama dengan KPP Pratama Bengkulu Satu dalam melakukan Kegiatan Edukasi dengan tema tertentu • Bekerja sama dengan KPPN dalam melakukan Kegiatan Edukasi kepada WP Instansi Pemerintah • Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan Kegiatan Edukasi kepada WP Koperasi dan Pelaku UMKM	2025

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100%	100%
Realisasi	6.33%	12.74%	12.74%	18.00%	18.00%	110.960%	110.960%
Capaian	120.00%	127.40%	127.40%	120.00%	120.00%	110.96%	110.96%

- Deskripsi Sasaran Strategis
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU
  Indeks Hasil Survei
- Realisasi IKU

24	KPP MADYA TANGERANG	87.12	82.96		85.04		88.15	106.10		
25	KPP PRATAMA KOSAMBI	86.33	82.55		84.44		87.53	105.53		
26	KPP PRATAMA TIGARAKSA	88.72	82.57		85.64		88.78	106.78		
27	KPP PRATAMA SERANG BARAT	87.96	85.58		86.77		89.95	107.95		
28	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91.22	82.46		86.84		90.02	108.02		
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG		92.01	87.44	86.44		88.63			91.87	109.87
29	KPP PRATAMA KOTABUMI	94.99	86.26		90.62		93.94	111.94		
30	KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	93.33	89.46		91.39		94.74	112.74		
31	KPP PRATAMA NATAR	89.41	83.93		86.67		89.84	107.84		
32	KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	90.42	88.77		89.59		92.87	110.87		
33	KPP PRATAMA BENGKULU SATU	92.44	87.54		89.99		93.28	111.28		
34	KPP MADYA BANDAR LAMPUNG	92.11	86.89		89.50		92.77	110.77		
35	KPP PRATAMA METRO	90.83	85.61		88.22		91.45	109.45		
36	KPP PRATAMA CURUP	90.79	91.62		91.20		94.54	112.54		
37	KPP PRATAMA BENGKULU DUA	91.32	88.05		89.68		92.96	110.96		

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Bengkulu Dua adalah 110.96. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Pratama Bengkulu Dua telah optimal dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. KPP Pratama Bengkulu Dua akan senantiasa melayani wajib pajak dengan sepenuh hati sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	110.96

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	110,96%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan terdapat dalam Dokumen Renja dan Renstra DJP yaitu Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP dengan target 100% dan realisasinya pada KPP Pratama Bengkulu Dua adalah sebesar 110.96.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	110.96

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tidak terdapat dalam target standar nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam mencapai target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bengkulu Dua. Adapun upaya tersebut antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan:
- Pelatihan Pegawai: KPP Pratama Bengkulu Dua secara rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada wajib pajak.
- Fasilitas yang Memadai: KPP Pratama Bengkulu Dua memastikan bahwa fasilitas yang tersedia, seperti ruang tunggu, loket pelayanan, dan komputer, nyaman dan berfungsi dengan baik untuk mendukung proses pelayanan yang efisien.
- Inovasi Layanan: KPP Pratama Bengkulu Dua terus berupaya untuk mengembangkan inovasi layanan, seperti layanan daring atau layanan melalui telepon, untuk memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan kantor pajak.

b. Peningkatan Efektivitas Penyuluhan:
- Materi Penyuluhan yang Relevan: KPP Pratama Bengkulu Dua menyusun materi penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan wajib pajak, seperti informasi tentang peraturan perpajakan terbaru, tata cara pelaporan pajak, dan tips-tips perpajakan.
- Metode Penyuluhan yang Bervariasi: KPP Pratama Bengkulu Dua menggunakan berbagai metode penyuluhan, seperti seminar, lokakarya, diskusi, dan media sosial, untuk menjangkau berbagai kalangan wajib pajak.
- Evaluasi Efektivitas Penyuluhan: KPP Pratama Bengkulu Dua secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan penyuluhan untuk mengetahui apakah materi dan metode yang digunakan sudah tepat sasaran dan memberikan pemahaman yang baik kepada wajib pajak.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

  Keberhasilan peningkatan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di KPP Pratama Bengkulu Dua dapat disebabkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa di antaranya:

  a. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
  b. Fokus pada kebutuhan wajib pajak terkait pelayanan dan informasi perpajakan.
  c. Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi perpajakan.
  d. Penggunaan teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan penyuluhan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi sumber daya manusia dengan cara peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi perpajakan.
b. Efisiensi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
c. Melakukan inovasi antara lain layanan daring, layanan melalui telepon dan penggunaan metode penyuluhan yang bervariasi.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Program yang menunjang keberhasilan kinerja IKU Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

  a. Melakukan edukasi kepada wajib pajak dalam mengisi survei kepuasan.
  b. Melakukan survei di dalam maupun di luar kantor (pojok pajak, Mall Pelyanan Publik).

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  a. Respon terhadap pertanyaan wajib pajak dengan cepat dan akurat.
  b. Melakukan sosialisasi informasi perpajakan secara aktif melalui berbagai media.
  c. Mendorong wajib pajak untuk menggunakan aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Untuk mencapai kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tentu menghadapi berbagai kendala antara lain:

  a. Banyak Wajib Pajak yang belum terlalu paham teknologi yang digunakan dalam pengisian survei.
  b. Wajib pajak enggan mengikuti survei dengan teknologi digital.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  a. Semua wajib pajak, termasuk penyandang disabilitas, harus dapat mengakses layanan dan informasi perpajakan dengan mudah. Ini melibatkan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, materi penyuluhan dalam berbagai format (misalnya, huruf braille, audio), dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami.
  b. Layanan dan penyuluhan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, perempuan mungkin memiliki kebutuhan informasi yang berbeda terkait perpajakan keluarga atau usaha mikro.

c. Ketika layanan dan penyuluhan inklusif dan mudah diakses, wajib pajak merasa dihargai dan diperhatikan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
  a. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang merasa dihargai dan dilayani dengan baik akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka.
  b. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang percaya kepada pemerintah akan lebih bersedia untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan survei terhadap penerima layanan TPT - Melakukan survei terhadap penerima layanan helpdesk - Melakukan survei terhadap penerima layanan di luar kantor (Pojok Pajak, Mall Pelayanan Publik) - Melakukan survei terhadap penerima layanan edukasi	2025

05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90.00%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	111.69%	111.69%	114.46%	114.46%	114.35%	114.35%
Capaian	133.33%	124.10%	124.10%	120.00%	120.00%	127.06%	127.06%

- Deskripsi Sasaran Strategis
  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- Realisasi IKU

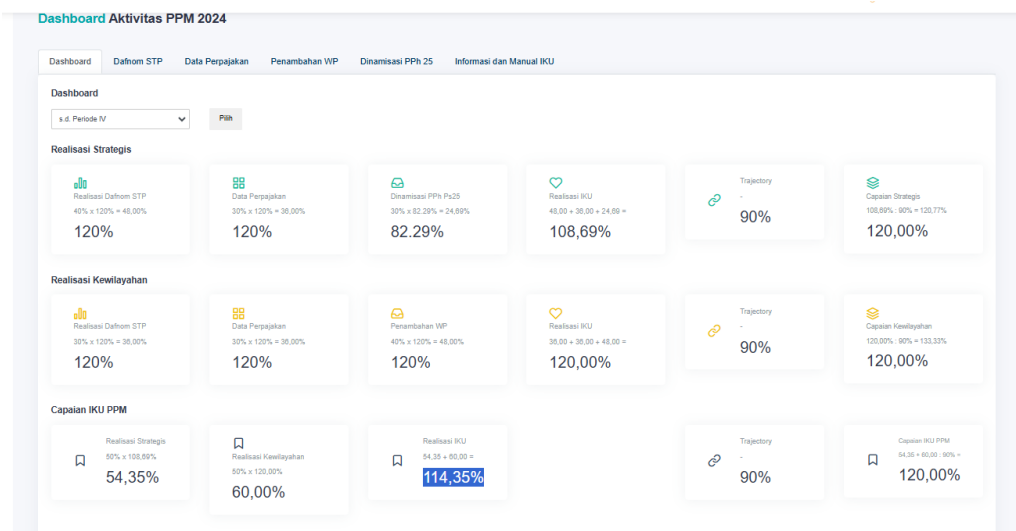

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah 114.35% dari target 90% sehingga capaian IKU ini adalah 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	110.65%	120%	114.35%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target tahun 2024 dalam renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	100%		90%	114,35%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	114,35%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
     a. Sinergi dengan Pemerintah Daerah: Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
     b. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Menggandeng sektor swasta untuk memberikan edukasi perpajakan kepada karyawan dan pelanggan mereka.
     c. Penerbitan STP sebagai tindak lanjut daftar nominatif.
     d. melakukan tindak Lanjut data DSPE melalui penerbitan SP2DK Ekstensifikasi.
     e. melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan untuk menambah basis data.
     f. menindaklanjuti Daftar Nominatif yang berada di Approweb setiap bulan dan menindaklanjuti data diluar daftar nominatif.
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
     a. Pimpinan yang memiliki visi yang jelas, komitmen yang tinggi, dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan pengawasan pembayaran masa akan sangat menentukan keberhasilan.
     b. Peningkatan kinerja pengawasan membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi.

c. Peraturan perpajakan yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
d. Sistem informasi yang terintegrasi dan *real-time* memungkinkan petugas pajak untuk memantau pembayaran secara efektif dan mengidentifikasi potensi risiko keterlambatan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  a. Target pengawasan pembayaran masa harus ditetapkan berdasarkan data dan analisis yang akurat, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
  b. Rencana aksi harus mencakup langkah-langkah yang spesifik, alokasi sumber daya yang jelas, dan jadwal waktu yang realistis.
  c. Mengintegrasikan sistem informasi perpajakan untuk mempermudah pemantauan pembayaran, identifikasi risiko, dan pelaporan.
  d. Memastikan petugas pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  a. Edukasi dan Sosialisasi: Mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu, manfaatnya bagi negara, dan konsekuensi dari keterlambatan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, media sosial, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat
  b. Kampanye Kesadaran**:** Mengadakan kampanye kesadaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka. Kampanye ini dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti iklan di media massa, spanduk, dan baliho.
  c. Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan *real-time* untuk mempermudah pemantauan pembayaran, identifikasi risiko, dan pelaporan.
  d. Peningkatan Kompetensi: Memastikan petugas pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  a. Risiko Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dimitigasi dengan melakukan penyuluhan langsung kepada wajib pajak, terutama yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran.
  b. Risiko Sistem dan Prosedur yang Tidak Efisien dimitigasi dengan Mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan *real-time*

untuk mempermudah pemantauan pembayaran, identifikasi risiko, dan pelaporan.

c. Risiko Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai dimitigasi dengan memberikan pelatihan yang relevan kepada petugas pajak mengenai teknik pengawasan, penggunaan teknologi, dan komunikasi efektif.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
  a. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu diatasi dengan melakukan penyuluhan langsung kepada wajib pajak, terutama yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran.
  b. Sistem informasi perpajakan yang belum terintegrasi, proses pelaporan dan pembayaran yang rumit, atau kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas diatasi dengan mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan *real-time* untuk mempermudah pemantauan pembayaran, identifikasi risiko, dan pelaporan.
  c. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pajak, kurangnya pelatihan, atau kurangnya motivasi kerja diatasi dengan memberikan pelatihan yang relevan kepada petugas pajak mengenai teknik pengawasan, penggunaan teknologi, dan komunikasi efektif.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Dengan melakukan analisis GEDSI yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa sistem perpajakan yang kita miliki inklusif dan adil bagi semua orang. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
  a. Pengawasan pembayaran masa yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dana yang terkumpul dari pajak dapat dialokasikan untuk program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.
  b. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau praktik bisnis yang berkelanjutan.

Pengawasan pembayaran masa yang baik memastikan bahwa insentif ini diberikan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

c. Penerimaan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat, termasuk program pencegahan stunting. Program-program ini dapat mencakup penyediaan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan balita, edukasi tentang kesehatan dan gizi, serta perbaikan sanitasi dan air bersih.

d. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, akses terhadap modal usaha, dan pendampingan bisnis.

e. Pemerintah dapat menggunakan dana pajak untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Penelitian material terhadap perhitungan PPh Pasal 25 - Tindak lanjut data tahun berjalan	2025

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	119.50%	119.50%	119.15%	119.15%	120%	120%
Capaian	N/A	119.50%	119.50%	119.15%	119.15%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

  a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- Realisasi IKU

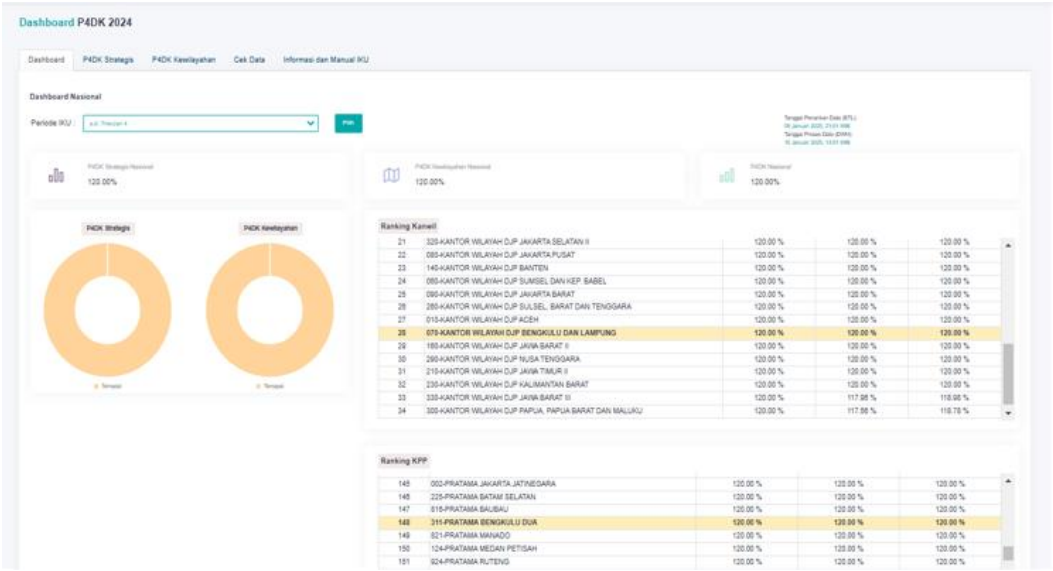

Realisasi IKU P4DK tahun 2024 pada KPP Pratama Bengkulu Dua adalah senilai 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	109,10%	120%	172.66%	120%	120%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target tahun 2024 dalam renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
     a. menghubungi Wajib Pajak melalui layanan media audio/visual
     b. melakukan kunjungan visit lapangan
     c. Penerbitan LHPt, SP2DK dan LHP2DK
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

     Penyebab keberhasilan kinerja adalah:
     a. Data dan informasi yang dibutuhkan mudah diakses, terstruktur dengan baik, dan tersedia dalam format yang sesuai.
     b. Organisasi memiliki sistem dan prosedur yang jelas, efisien, dan terdokumentasi dengan baik untuk menerima, memproses, dan menanggapi permintaan penjelasan.

c. Staf yang kompeten, terlatih, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang data dan informasi yang relevan.
d. Pemanfaatan teknologi yang tepat, seperti sistem basis data, perangkat lunak analisis data, dan platform komunikasi yang efektif.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
  a. Mengembangkan dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk setiap tahapan proses permintaan penjelasan, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian. SOP ini harus mencakup alur kerja, tanggung jawab, dan batasan waktu.
  b. Memberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan kepada staf yang bertanggung jawab atas permintaan penjelasan. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang data dan informasi yang relevan, keterampilan komunikasi yang efektif, serta penggunaan teknologi yang mendukung.
  c. Mengembangkan atau memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi yang relevan. Sistem ini harus mudah diakses, mudah digunakan, dan memiliki fitur pencarian yang kuat.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  a. Data dan informasi yang dibutuhkan mudah diakses, terstruktur dengan baik, dan tersedia dalam format yang sesuai.
  b. Organisasi memiliki sistem dan prosedur yang jelas, efisien, dan terdokumentasi dengan baik untuk menerima, memproses, dan menanggapi permintaan penjelasan.
  c. Pemanfaatan teknologi yang tepat, seperti sistem basis data, perangkat lunak analisis data, dan platform komunikasi yang efektif.
  d. Komunikasi yang efektif antara pihak yang meminta penjelasan dan pihak yang memberikan penjelasan, termasuk kejelasan pertanyaan, respons yang komprehensif, dan penyampaian yang tepat waktu.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  a. Risiko data tidak lengkap atau tidak akurat dimitigasi dengan menerapkan proses validasi data yang ketat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan relevan.
  b. Risiko keterbatasan teknologi dimitigasi dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mendukung proses penanganan permintaan penjelasan, seperti sistem basis data, perangkat lunak analisis data, dan platform komunikasi yang efektif.

c. Komunikasi yang buruk dimitigasi dengan membangun saluran komunikasi yang efektif antara pihak yang meminta penjelasan dan pihak yang memberikan penjelasan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Kendala yang dihadapi:

  a. Kendala data dan informasi yang dibutuhkan sulit diakses, tidak terstruktur dengan baik, tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak tersedia sama sekali.
  b. Keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi, atau sistem yang tidak terintegrasi dengan baik.
  c. Kurangnya komunikasi, miskomunikasi, atau respons yang lambat.

  Langkah yang diambil:

  a. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, termasuk ketersediaan data, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, teknologi, komunikasi, dan manajemen
  b. Memastikan data dan informasi mudah diakses, terstruktur dengan baik, dan tersedia dalam format yang sesuai.
  c. Memberikan pelatihan tentang data dan informasi yang relevan, sistem dan prosedur, serta keterampilan komunikasi.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Analisis AKPaM dengan perspektif GEDSI membantu memastikan bahwa mekanisme permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan inklusif dan adil bagi semua orang. Dengan memperhatikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari berbagai kelompok, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dari mekanisme permintaan penjelasan, serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan bermanfaat bagi semua pihak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Penting untuk dipahami bahwa IKU ini secara *tidak langsung* mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

  a. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. IKU ini memastikan bahwa permintaan informasi terkait hal ini ditanggapi dengan cepat dan akurat.

b. Masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan anggaran untuk program-program pencegahan stunting.
c. IKU ini mendorong penyediaan data terpilah berdasarkan gender, yang penting untuk memahami isu-isu kesetaraan gender dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
d. Masyarakat dapat memantau pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk alokasi anggaran dan target penerima manfaat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Penelitian kepatuhan material, terutama terhadap WP baru eks WP Kewilayahan - Tindak lanjut DPP	2025

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117.72%	119.54%	119.54%	118.27%	118.27%	120%	120%
Capaian	117.72%	119.54%	119.54%	118.27%	118.27%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- Formula IKU
  (Capaian Pemanfaatan Data STP + Capaian Pemanfaatan Data Matching)/2
- Realisasi IKU

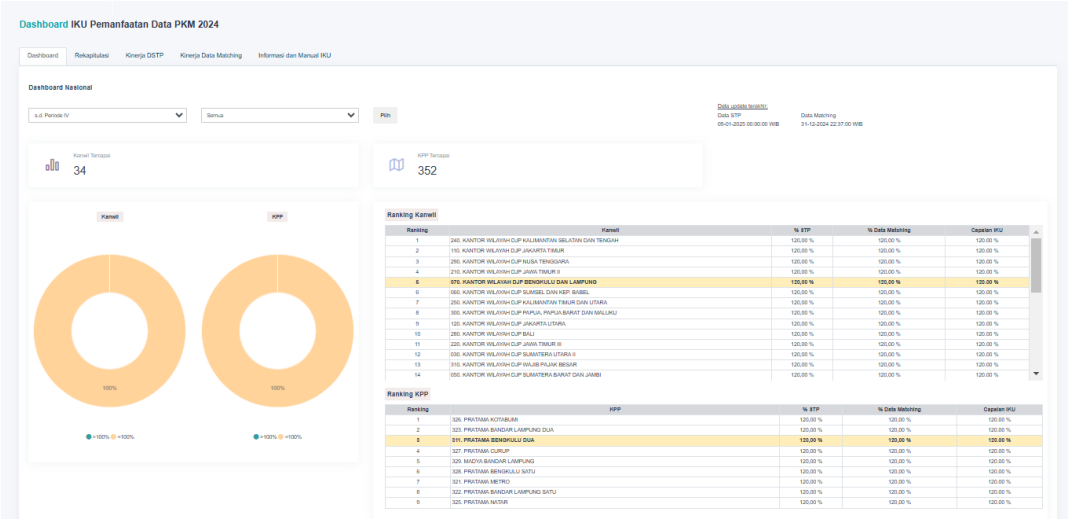

Realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target tahun 2024 dalam renja DJP	Target tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terdapat dalam dokumen Renja dan Renstra DJP, Adapun realisasinya sebesar 120% melebihi target.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

     Upaya yang dilakukan:
     a. Pencarian data secara mandiri
     b. menindaklanjuti data pemicu yang belum ditindaklanjut oleh Wajib Pajak dengan mengusulkan pada DSP4 Kolaboratif
   - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

     Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah:
     a. Data dari tahun-tahun sebelumnya tersedia secara lengkap, akurat, relevan, dan mudah diakses. Data tersebut disimpan dalam format yang terstruktur dan terorganisir dengan baik.
     b. Organisasi memiliki sistem dan infrastruktur yang memadai untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari tahun-tahun sebelumnya. Sistem ini terintegrasi dengan baik dengan sistem lain yang relevan.
     c. Staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
   - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

a. Pemanfaatan teknologi dengan cara Investasikan dalam teknologi yang tepat untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data historis.
b. Pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan kepada staf tentang pengolahan dan analisis data historis.
c. Pemanfaatan data historis yang efisien membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan antara lain:
  a. Pengembangan sistem basis data yang terintegrasi, digitalisasi data, standarisasi format data, dan pemeliharaan data secara berkala.
  b. Validasi data, pembersihan data, dan standarisasi data.
  c. Pelatihan tentang pengolahan dan analisis data historis, penggunaan perangkat lunak analisis data, dan interpretasi hasil analisis.
  d. Pengembangan prosedur standar untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data historis.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
  a. Risiko ketersediaan data dimitigasi dengan mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi, melakukan digitalisasi data, dan mendokumentasikan data dengan baik.
  b. Risiko kualitas data dimitigasi dengan melakukan validasi data, pembersihan data, dan standarisasi data secara berkala.
  c. Risiko sumber daya manusia dimitigasi dengan Memberikan pelatihan kepada staf tentang pengolahan dan analisis data historis.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Kendala yang dihadapi adalah keengganan wajib pajak dalam membayar Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Tagihan Pajak yang tidak sampai tujuan (kempos).
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Analisis AKPaM dengan perspektif GEDSI membantu memastikan bahwa pemanfaatan data historis inklusif dan adil bagi semua orang. Dengan memperhatikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari berbagai kelompok, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dari pemanfaatan

data historis, serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan bermanfaat bagi semua pihak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  IKU ini mendukung pencapaian penerimaan yang nantinya mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Pencarian data internal, terutama terhadap WP baru eks WP Kewilayahan - Tindak lanjut data yang diturunkan oleh KPDJP	2025

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	96.33%	96.33%	110.14%	110.14%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	96.33%	96.33%	110.14%	110.14%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

a. Komponen 1 (Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

b. Komponen 2 (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c. Komponen 3 (Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-

15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU per komponen adalah sebagai berikut.

Bobot	Komponen	Capaian				Trajectory			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
30%	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120%	120%	120.00%	**120.00%**	100%	100%	100%	**100%**
40%	Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan	0%	0%	99.21%	**99.21%**	60%	70%	75%	**80%**
30%	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120%	120%	110.67%	**114.84%**	10%	50%	75%	**100%**

Sumber: Bukti Pendukung Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Berdasarkan capaian per komponen tersebut, dengan berpedoman pada formula IKU, didapatkan capaian realisasi sebesar 110,14%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	110,14%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

   IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

   IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (LPT KKWP KPP) telah dilaporkan sebelum jatuh tempo yaitu di tanggal 19 Januari 2024 untuk TW I, 19 April 2024 untuk TW II sehingga mendapat poin 1,2, dan 15 Juli 2024 untuk TW III,
  b. Koordinasi semua Seksi yang terkait dalam penyusunan LPT KKWP KPP,
  c. Penetapan DPP Kolaboratif Semester II tahun 2024 yang terdiri dari 441 DPP Kolaboratif dan 381 Wajib Pajak,
  d. Pengiriman usulan DPP Mandatory untuk menambah bahan baku PKM Pengawasan.
  e. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Kinerja Pengawasan, Kinerja FPP-P3, dan Kinerja Pelayanan-Sisuluh.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Terkait pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yang belum maksimal (110,14% dari 120%) dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:

  a. Target PPM tidak dipisahkan per jenis pajak
  b. Bahan baku PKM yang tersedia di sistem semakin sedikit
  c. Kemauan WP untuk membayar pajak masih relatif rendah dan WP yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan/penagihan aktif susah ditemui
  d. Wilayah kerja yang luas mencakup 3 kabupaten dan setengah kota
  e. Kompetensi aktor yang belum merata

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Membuat perhitungan target PPM per jenis pajak

b. Menambah usulan DPP Mandatory dan percepatan penyelesaian DPP Outstanding
c. Menambah DSPP berkualitas dan percepatan penyelesaian pemeriksaan outstanding
d. Melakukan KPDL untuk menghimpun data yang belum diperoleh yang berkualitas menambah PKM
e. Melakukan tindakan penagihan aktif, konseling, dan kunjungan ke WP sesuai prioritas ketertagihan
f. Meningkatkan budaya Transfer of Knowledge (TOK) antar pegawai dan mengusulkan pelatihan peningkatan kompetensi untuk pegawai.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
c. Risiko terhadap bahan baku PKM yang tersedia semakin sedikit dimitigasi salah satunya dengan melaksanakan KPDL yang berkualitas.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktudapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala target PPM tidak dipisahkan per jenis pajak yang diatasi dengan membuat perhitungan target PPM per jenis pajak.
b. Kendala bahan baku PKM yang tersedia di sistem semakin sedikit diatasi dengan menambah usulan DPP Mandatory dan percepatan penyelesaian DPP outstanding, menambah DSPP berkualitas dan percepatan penyelesaian pemeriksaan outstanding,

dan melakukan KPDL untuk menghimpun data yang belum diperoleh yang berkualitas menambah PKM.

c. Kendala kemauan WP untuk membayar pajak masih relatif rendah dan WP yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan/penagihan aktif susah ditemui diatasi dengan melakukan tindakan penagihan aktif, konseling dan kunjungan ke WP sesuai prioritas ketertagihan.

d. Kendala kompetensi aktor yang belum merata diatasi dengan meningkatkan budaya *Transfer of Knowledge* (TOK) antar pegawai dan mengusulkan pelatihan peningkatan kompetensi untuk pegawai.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Membuat perhitungan target PPM per jenis pajak

b. Menambah usulan DPP Mandatory dan percepatan penyelesaian DPP Outstanding

c. Menambah DSPP berkualitas dan percepatan penyelesaian pemeriksaan outstanding

d. Melakukan KPDL untuk menghimpun data yang belum diperoleh yang berkualitas menambah PKM

e. Melakukan tindakan penagihan aktif, konseling dan kunjungan ke WP sesuai prioritas ketertagihan

f. Meningkatkan budaya Transfer of Knowledge (TOK) antar pegawai dan mengusulkan pelatihan peningkatan kompetensi untuk pegawai

07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	119.84%	119.84%	115.63%	115.63%	120%	120%
Capaian	120%	119.84%	119.84%	115.63%	115.63%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan

nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	89,74%	119,65%	17,95%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	101,22%	101,22%	25,30%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	80,64%	80,64%	24,19%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	104,20%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	72,22%	103,17%	5,16%
Realisasi IKU						**102,60%**
Target IKU						**80,00%**

*Max 120%

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)	**120,00%**

*Max 120%

Realisasi Variabel Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu
(IKU Tingkat Efektivitas Penilaian)
Triwulan II

Jenis Penilaian	Tepat Waktu			Lewat Waktu			Total	Bobot / indeks						Realisasi						Total
								Tepat Waktu			Lewat Waktu			Tepat Waktu			Lewat Waktu			
	Permintaan Bantuan DSP4 / RBV	Proaktif DPP	Proaktif non DPP	s.d. 1 bulan	1 - 2 bulan	> 2 bulan		Permintaan Bantuan DSP4 / RBV	Proaktif DPP	Proaktif non DPP	s.d. 1 bulan	1 - 2 bulan	> 2 bulan	Permintaan Bantuan DSP4 / RBV	Proaktif DPP	Proaktif non DPP	s.d. 1 bulan	1 - 2 bulan	> 2 bulan	
PI	6						**6**	1,2	1,1	1	0,8	0,6	0,4	7,2	0	0	0	0	0	7,2
PII/BI							**0**	1,2	1,1	1	0,8	0,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0
BII/ATB							**0**	1,2	1,1	1	0,8	0,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0
NJOPL	3						**3**	1,2	1,1	1	0,8	0,6	0,4	3,6	0	0	0	0	0	3,6
Jumlah Penyelesaian Penilaian							**9**							Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu						10,8

Jenis Penilaian	Jangka Waktu
Properti I	paling lama 1 bulan
Properti II / Bisnis I	paling lama 2 bulan
Bisnis II / ATB	paling lama 3 bulan
NJOP Lapangan	15 Hari Kerja / 21 Hari

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Capaian Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu : **120,00%**
*capaian maks 120%

Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Trajectory	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**

Sumber: Bukti Pendukung Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Berdasarkan capaian per komponen tersebut, dengan berpedoman pada formula IKU, didapatkan capaian realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, terdapat IKU bernama tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian yang mencapai realisasi sebesar 106,85%.

Sementara di tahun kinerja 2024, realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Bengkulu Dua adalah 120%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Telah diselesaikan Laporan Penilaian NJOPL sebanyak 3 LAP,
  b. Telah diselesaikan Laporan Penilaian NJOPK sebanyak 29 LAP,
  c. LHP terbit sebanyak 83 LHP,
  d. SP2 terbit sebanyak 152 SP2,
  e. Pengusulan DSPP Tahap II Relaksasi dan DSPP Tahap III sebanyak 12 usulan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Terkait pencapaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian

     Capaian signifikan efektivitas pemeriksaan dan penilaian secara umum didorong oleh aktivitas aktif para aktor dan kepatuhan wajib pajak.
  b. Pendorong penurunan kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian
     1) Kekurangan bahan baku pemeriksaan yang memiliki potensi signifikan
     2) Kuantitas kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan lainnya masih belum signifikan baik dari permintaan bantuan penilaian maupun proaktif

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Menyelesaikan Penilaian NJOP atas kegiatan rutin penerbitan ketetapan PBB seperti dalam pemeriksaan PBB

b. Melakukan Koordinasi dan Menyelesaikan Kegiatan penilaian terhadap Permintaan Bantuan Penilaian NJOP Properti I, I, Bisnis I, II, Proaktif maupun DSP4

c. Melanjutkan Rapat Pembahasan Pra SPHP

d. Penyampaian Usulan DSPP Tambahan

e. Melanjutkan penyampaian Laporan Rutin Bulanan Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Formal Pemeriksaan

f. Melanjutkan Rapat Rutin dengan Seksi Pelayanan dalam rangka mitigasi risiko jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana Pasal 17B UU KUP agar tidak terlewatkan

g. Melaksanakan penerbitan SP2 atas NP2 yang belum terbit SP2 sebanyak 4

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

c. Risiko terhadap bahan baku PKM yang tersedia semakin sedikit dimitigasi salah satunya dengan melaksanakan KPDL yang berkualitas.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Belum memaksimalkan potensi bahan baku penilaian sesuai PMK-79 Tahun 2023 yang diatasi dengan:
   1) Menyelesaikan Penilaian NJOP atas kegiatan rutin penerbitan ketetapan PBB seperti dalam pemeriksaan PBB.
   2) Melakukan Koordinasi dan Menyelesaikan Kegiatan penilaian terhadap Permintaan Bantuan Penilaian NJOP Properti I, I, Bisnis I, II, Proaktif maupun DSP4

b. Kekurangan bahan baku pemeriksaan yang memiliki potensi signifikan diatasi dengan:
   1) melaksanakan rapat pembahasan pra SPHP,
   2) menyampaikan usulan DSPP tambahan,
   3) senantiasa membuat laporan rutin bulanan pemeriksaan dan laporan pemantauan pemenuhan ketentuan formal pemeriksaan,
   4) senantiasa menggekar rapat rutin dengan seksi pelayanan dalam rangka mitigasi risiko jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana Pasal 17B UU KUP agar tidak terlewatkan.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Pemeriksaan

1) Melanjutkan pelaksanaan rapat pra SPHP atas pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin LB restitusi dengan nilai LB diatas 250juta
2) Mengusulkan DSPP RBP dan/atau DSPP tanpa pengawasan Tahap I, Tahap II, Tahap III Tahun 2025
3) Melakukan adjustment DSPP Kolaboratif Semester I dan Semester II Tahun 2025

4) Penerbitan NP2 dan SP2 pemeriksaan khusus sebanyak 50 dan NP2 pemeriksaan rutin sebanyak 40
5) Mengingatkan Tim Pemeriksa Pajak atas tunggakan pemeriksaan yang akan jatuh tempo pengujian
6) Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 120 permohonan
7) Menindaklanjuti usulan pemeriksaan data konkret

b. Penilaian

1) Menyelesaikan Penilaian NJOP atas kegiatan rutin penerbitan ketetapan PBB seperti dalam pemeriksaan PBB
2) Melakukan Koordinasi dan Menyelesaikan Kegiatan penilaian terhadap Permintaan Bantuan Penilaian NJOP Properti I, I, Bisnis I, II, Proaktif maupun DSP4 untuk tujuan perpajakan laninnya
3) Membantu pelaksanaan Pemeriksaan PBB P5L sebagai tenaga ahli

07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**30%**	**30%**	**45%**	**45%**	**75%**	**75%**
Realisasi	**56,67%**	**56,67%**	**85,00%**	**85,00%**	**106,68%**	**106,68%**
Capaian	**188,90%**	**188,90%**	**120,00%**	**120,00%**	**142,24%**	**142,24%**

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- Realisasi IKU

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	120.00%	50%	60.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	94.00%	20%	18.80%
Variabel pencairan DSPC	93.54%	30%	28.06%
Total			106.86%
Indeks Capaian IKU Q4 = (93,38% / 75%)			142.48%

Sumber: Bukti Pendukung Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Berdasarkan capaian per komponen tersebut, berpedoman pada formula IKU, didapatkan realisasi sebesar 106,86% dan capaiannya sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Tingkat efektivitas penagihan	-	111,91%	110,39%	100,23%	106,86%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU tingkat efektivitas penagihan di KPP Pratama Bengkulu Dua. Namun terdapat IKU bernama tingkat efektivitas penegakan hukum penagihan, dan kolaborasi yang mencapai realisasi 113,21% pada tahun kinerja 2023.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan konseling kepada Wajib Pajak.
b. Menerbitkan surat teguran.
c. menerbitkan Surat Paksa bagi WP/PP yang melampaui batas jatuh tempo Surat Teguran
d. menerbitkan SPMP
e. melakukan pemblokiran atas harta WP/PP yang tersimpan di LJK Perbankan
f. menindaklanjuti WP DSPC.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Terkait pencapaian IKU tingkat efektivitas penagihan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas penagihan

Capaian signifikan efektivitas penagihan secara umum didorong oleh aktivitas aktif para aktor dan kepatuhan wajib pajak.

b. Pendorong penurunan kinerja efektivitas penagihan

1) Penagihan aktif tidak segera dilakukan terhadap WP/PP Penunggak Pajak tahun berjalan yang sudah inkrah sehingga dapat menambah piutang/tunggakan pajak tahun berikutnya
2) WP/PP Penunggak Pajak sulit/tidak ditemukan

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan konseling kepada wajib pajak
b. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa dengan segera
c. Melakukan pemblokiran dengan segera jika diperlukan
d. Menerbitkan SPMP dan melakukan penjualan barang hasil sita
e. Menindaklanjuti wajib pajak DSPC
f. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi DSPC

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

  a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Realisasi efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah Penetapan target PKM penagihan terlalu besar. Oleh karena itu uupaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Mengoptimalkan tindakan penagihan atas ketetapan yang telah JT dan inkrah
  b. melakukan profiling WP meliputi pengurus, aset pengurus, kontak, dan lokasi Penanggung Pajak atau Wajib Pajak
  c. Melakukan monitoring piutang rutin untuk mengetahui ketetapan baru yang dapatmenjadi potensi
  d. Mengoptimalkan tidak lanjut dan pencairan atas WP DSPC

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Akan melakukan Konseling kepada 72 Wajib Pajak Penunggak Pajak
b. Akan menerbitkan Surat Teguran sebanyak 2.500 surat
c. Akan menerbitkan Surat Paksa sebanyak 1.500 surat
d. Akan melakukan pemblokiran sebanyak 30 surat
e. Akan menerbitkan SPMP sebanyak 50 surat
f. Akan melakukan penjualan barang sitaan sebanyak 8 surat
g. Akan menindaklanjuti 50 WP DSPC
h. Monitoring dan pengolahan data piutang untuk pengoptimalan tindakan penagihan

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%	200%	200%
Capaian	N/A	200.00%	200.00%	120.00%	120.00%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

  Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu

Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

  (Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/

  Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x 100%

- Realisasi IKU

  Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, capaian realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 120% dengan total 2 wajib pajak yang diusulkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	106,86%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di KPP Pratama

Bengkulu Dua. Namun terdapat IKU bernama tingkat efektivitas penegakan hukum penagihan, dan kolaborasi yang di dalamnya terdapat komponen Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mencapai realisasi 100,66% pada tahun kinerja 2023.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain melakukan Penelitian pendahuluan (*mapping*) terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal yang mendorong keberhasilan kinerja IKU ini salah satunya adalah melakukan Analisis lanjutan terhadap Wajib Pajak yang terpilih untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Seksi P3, FPP, dan Bidang PPIP Kanwil.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan mapping terhadap wajib pajak yang memiliki potensi untuk diusukan pemeriksaan bukti permulaan
b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah Penetapan target PKM penagihan terlalu besar. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain senantiasa melakukan Penelitian pendahuluan (mapping) terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan agar dihasilkan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

   a. Merencanakan dan memetakan wajib pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

   b. Melakukan *mapping* terhadap wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

08a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**20%**	**50%**	**50%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**26.50%**	**115.78%**	**115.78%**	**137.08%**	**137.08%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**132.50%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120%**	**120%**

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU

  ((Realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan + Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan) /2) x 100%

- Realisasi IKU

Penyediaan Data Potensi Perpajakan				
Target KPDL	900			
Realisasi	1597			
Realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan	177.44%			
Realisasi Max 120%				
Laporan Pengamatan				
Target	4 laporan pengamatan			
Realisasi TW III	5 laporan pengamatan dengan bobot 1,1			
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan	138%			
Realiasi max 120%				
Realisasi IKU 8a-CP	=	(177.44%+138%)/2		157.47%

Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120% dengan total realisasi penyediaan data potensi perpajakan adalah 177,44% dan realisasi penyelesaian laporan pengamatan adalah 138%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	204%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

   IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

   Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP Pratama Bengkulu Dua.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain melakukan perencanaan KPDL dengan baik sehingga dihasilkan hasil KPDL yang berkualitas, membentuk tim pengamatan sesuai kompetensi dan *timeline* kegiatan pengamatan, dan memanfaatkan data ILAP yang sudah dihimpun untuk meningkatkan kualitas KPDL.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal yang mendorong keberhasilan kinerja IKU ini salah satunya adalah melakukan perencanaan KPDL dengan baik sehingga dihasilkan hasil KPDL yang berkualitas, membentuk tim pengamatan sesuai kompetensi dan *timeline* kegiatan pengamatan.

Sementara hal yang mendorong penurunan kinerja IKU ini salah satunya wajib pajak yang dilakukan KPDL tidak memiliki potensi perpajakan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Penyelesaian Laporan Pengamatan oleh setiap seksi pengawasan (masing-masing 1) dan untuk Penyediaan Data Potensi Perpajakan sudah tercapai 1.094 KPDL atau 121,56% dari total target
  b. Pelaksanaan KPDL berkualitas untuk menghasilkan data yang berkualitas.
  c. Memastikan validasi formal dan material tepat waktu
  d. Monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam Kinerja Pengawasan dan dilakukan pembahasan dalam rapat pembinaan
  e. Melakukan perencanaan strategi optimalisasi penyelesaian laporan pengamatan

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
c. Risiko terhadap data yang dihasilkan tidak berkualitas dimitigasi dengan melakukan perencanaan dan penelitian pendahuluan (mapping) terhadap Wajib Pajak sebelum dilakukan KPDL atau pengamatan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah Wajib Pajak yang dilakukan KPDL atau pengamatan tidak memiliki potensi pajak yang signifikan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain senantiasa melakukan penelitian pendahuluan (mapping) terhadap Wajib Pajak yang akan dilakukan KPDL atau pengamatan.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya
   a. Menyusun rencana kerja untuk kegiatan KPDL dan pengamatan.
   b. Melakukan *mapping* terhadap wajib pajak yang akan diusulkan KPDL dan/atau pengamatan

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	80.25%	85.70%	85.70%	94.56%	94.56%	96.88%	96.88%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

- Realisasi IKU

Pemda	Data Utama						Data Regional Lainnya						BOBOT		Realisasi IKU 2024	Capaian IKU 2024
	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman 40%	Bobot Kelengkapan 60%	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman 40%	Bobot Kelengkapan 60%	Total Pembobotan	Data Utama 70%	Data Lainnya 30%		
Pem Kota Bengkulu	6	5	5	33%	60%	93%	6	5	5	33.3%	60.0%	93.3%	65.33%	28.0%	93.33%	
Pem Kab Seluma	6	4	4	27%	60%	87%	6	6	6	40.0%	60.0%	100.0%	60.67%	30.0%	90.67%	
Pem Kab Bengkulu Selatan	5	6	6	48%	60%	108%	5	5	5	40.0%	60.0%	100.0%	75.60%	30.0%	105.60%	120.00%
Pem Kab Kaur	5	5	5	40%	60%	100%	4	4	4	40.0%	60.0%	100.0%	70.00%	30.0%	100.00%	120.00%
Total	**22**	**20**	**20**	**36%**	**60%**	**96%**	**21**	**20**	**20**	**38.1%**	**60.0%**	**98.1%**	**67.45%**	**29.4%**	**96.88%**	120.00%

Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, capaian realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 96,88% dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam gambar di atas.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di KPP Pratama Bengkulu Dua.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain Koordinasi yang sinergi antara Seksi Penjaminan Kualitas Data – KP2KP Manna – KP2KP Bintuhan, Koordinasi dengan PIC PKS Tripartit dan Wali Data Pemerintah daerah Kota Bengkulu, Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan dan Kab kaur, dan memberikan Penawaran bantuan perekaman data apabila diperlukan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
   1) Koordinasi dengan berbagai pihak baik internal yaitu KP2KP Manna dan KP2KP Bintuhan maupun eksternal yaitu PIC PKS Tripartit dan Wali Data Pemerintah daerah Kota Bengkulu, Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan dan Kab kaur,
   2) menyampaikan Surat Pemintaan Konfirmasi Ketersediaan Data dan pendampingan atas pengisian tabelnya, membuat monitoring ILAP untuk menjaga kerapian dan ketertiban administrasi, dan
   3) melakukan penelitian terhadap data yang diterima agar sesuai dengan jawaban konfirmasi ketersediaan data yang telah disampaikan sebelumnya.
b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
   1) Data yang diberikan dari pemda belum sesuai format PKS Tripartit dan PMK-228/PMK.03/2017
   2) Beberapa elemen data yang dibutuhkan tidak diisi oleh pemda

3) Aplikasi yang digunakan pemda tidak mendukung dalam penyajian data sesuai format yang diminta
4) Kekurangan SDM di pemda untuk menyajikan data sesuai format yang diminta
5) Koordinasi antar Wali Data dan pemahaman atas kewajiban terkait penyampaian data di Pemda belum bagus

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait
b. Memberikan apresiasi atas kontribusi pemberian data pada tahun 2023 dan melakukan koordinasi untuk data ILAP 2024.
c. Penyampaian Surat Pemintaan Konfirmasi Ketersediaan Data dan pendampingan atas pengisian tabelnya
d. Penawaran bantuan perekaman data apabila diperlukan
e. Membuat monitoring ILAP untuk menjaga kerapian dan ketertiban administrasi
f. Penelitian terhadap data yang diterima agar sesuai dengan jawaban konfirmasi ketersediaan data yang telah disampaikan sebelumnya

g. Klarifikasi ke Pemda terkait atas data yang tidak sesuai dengan jawaban konfirmasi ketersediaan data

h. Pengiriman data ke Kanwil secara selektif karena nilai atas kelengkapan data lebih besar.

i. Pengumpulan data sesuai prioritas yaitu: UTAMA (Bobot Nilai 70%), Lainnya (Bobot Nilai 30%), dan Pengecualian (tidak masuk dalam hitungan target dan capaian IKU)

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan ILAP dimitigasi dengan memperkuat koordinasi dan melakukan edukasi serta sosialisasi kepada ILAP.

b. Risiko terhadap data yang dihasilkan tidak berkualitas dimitigasi dengan melakukan pendampingan kepada ILAP atas pengisian data, penawaran bantuan perekaman data, Penelitian terhadap data yang diterima agar sesuai dengan jawaban konfirmasi ketersediaan data yang telah disampaikan sebelumnya, dan klarifikasi ke pemda terkait atas data yang tidak sesuai dengan jawaban konfirmasi ketersediaan data.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah data yang diberikan oleh ILAP tidak lengkap, tidak sesuai format yang diminta, dan pemahaman perpajakan ILAP yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendampingan, edukasi, dan koordinasi secara teratur.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi selanjutnya

   a. Mengirimkan surat dan berkoordinasi kepada pemda terkait data ILAP terkait ketersediaan data dan datanya.

   b. Melakukan monitoring terhadap jawaban konfirmasi ketersediaan data yang telah dikirimkan oleh Pemda, mengolah data sesuai dengan format PKS yang akan dikirimkan ke kanwil.

   c. Melakukan kunjungan ke pemda untuk pemberian apresiasi atas pengiriman data ILAP.

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**119.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.50%**	**117.50%**
Capaian	**119.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.50%**	**117.50%**

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama yaitu kualitas kompetensi yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek 1, kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Aspek 2, kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Lalu aspek 3, pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Sementara komponen kedua yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yang terdiri dari 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Komponen kedua ini juga memiliki 3 aspek yaitu aspek 1 berupa pelaksanaan kegiatan, aspek 2 beru upa kepatuhan pelaporan, dan aspek 3 yaitu feedback peserta.

- Formula IKU

50% Komponen 1 + 50% Komponen 2 dengan bobot aspek sebagai berikut:

a. Komponen 1: 30% aspek 1, 35% aspek 2, dan 35% aspek 3.
b. Komponen 2: 60% aspek 1, 10% aspek 2, dan 30% aspek 3.

- Realisasi IKU

		Realisasi	Bobot	Bobot x Realisasi	Realisasi	Capaian Maksimal 120%
Tingkat Kualitas Kompetensi		**103.50%**			115.00%	115.00%
Aspek 1	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	100.00%	30%	30.00%		
Aspek 2	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	100.00%	35%	35.00%		
Aspek 3	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	110.00%	35%	38.50%		
Pelaksanaan Kebintalan SDM		**107.00%**			133.75%	120.00%
Aspek 1	Pelaksanaan Kegiatan	120.00%	60%	72.00%		
Aspek 2	Kepatuhan Pelaporan	110.00%	10%	11.00%		
Aspek 3	Feedback Peserta (hanya di triwulan 4)	80.00%	30%	24.00%		
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM						**117.50%**

Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, capaian realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,50% dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam gambar di atas.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru pada 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di KPP Pratama Bengkulu Dua.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain mengadakan kegiatan IHT secara berkala, mengingatkan pegawai untuk e-learning secara berkala, mengadakan kegiatan ujian kompetensi, serta mengadakan kegiatan pembinaan mental di bidang rohani, kejiwaan, ideologi dan kompetensi.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung

keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
   1) Membuat rencana tema IHT yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan permintaan pegawai
   2) Terbuka dengan saran dan masukan pegawai terhadap langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi pegawai
   3) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental secara rutin
b. Pendorong penurunan kinerja
   1) Kemampuan pegawai yang tetap tidak ada perbaikan atau kenaikan walaupun sudah difasilitasi berbagai hal untuk meningkatkan kompetensinya.
   2) Demotivasi pegawai

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan pegawai yang memiliki kompetensi khusus yang sangat baik untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya ke pegawai lain dengan TOK maupun IHT.
b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Penyelenggaraan IHT dan TOK untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara rutin setiap bulan.
b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk seluruh pegawai secara rutin setiap bulan.

c. Memberi dukungan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi *soft skill* di luar tugas dan fungsi di kantor seperti memberikan ST untuk pelatihan penulisan ke Kanwil, mengikuti kompetisi, dan sebagainya.
d. Memantau penyelesaian e-learning pegawai
e. Menyelenggarakan ujian kompetensi dengan sebelumnya menginformasikannya kepada pegawai agar bersiap.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan pegawai dimitigasi dengan membuat monitoring penyelesaian e-learning, absensi di setiap kegiatan bintal maupun peningkatan kompetensi, serta arahan dari kepala kantor dan atasan langsung.
b. Risiko terhadap pegawai yang demotivasi dilakukan dengan mengajak diskusi tatap muka secara tertutup dengan pegawai yang bersangkutan serta memberikan dukungan emosional dan dukungan profesional berupa tautan konseling DJP dan Kemenkeu jika diperlukan oleh pegawai ybs.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah kemampuan belajar pegawai yang berbeda-beda, motivasi pegawai yang tidak stabil, serta kesibukan pekerjaan yang banyak sehingga tidak cukup waktu untuk meningkatkan kompetensi diri. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dan kegiatan bintal secara rutin dan pemberian arahan dari Kepala Kantor dan atasan langsung agar senantiasa semangat bekerja dan belajar.

6. Rencana Aksi Selanjutnya
   a. Membuat daftar kompetensi teknis maupun non teknis yang bermanfaat bagi pegawai
   b. Membuat rencana penyelenggaraan IHT beserta temanya
   c. Membuat kotak saran bagi pegawai untuk mengusulkan tema IHT
   d. Membuat rencana penyelenggaraan kegiatan bintal

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target						**85%**	**85%**
Realisasi						**93,69%**	**93,69%**
Capaian						**110,22%**	**110,22%**

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil tarikan data NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, capaian dari dashboard NKO aplikasi mandor, didapatkan bahwa realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 93,69% dan capaian 110,22%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,80	93,93	96,36	93,69

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Bengkulu Dua.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain mengumpulkan data wajib pajak, memperbarui *database* wajib pajak, dan membuat daftar wajib pajak yang akan dijadikan responden serta memastikan datanya sudah valid.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit.

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja

1) Menyusun data wajib pajak yang akan menjadi responden survei penilaian integritas unit (SPIU)
2) Memastikan data pribadi wajib pajak calon responden sudah benar (alamat email, nomor hp, dan nama wajib pajak).

b. Pendorong penurunan kinerja

1) Data pribadi wajib pajak salah, baik email maupun nomor hp, sehingga pesan survei SPIU dari dir. KITSDA tidak sampai kepada wajib pajak.
2) Wajib pajak tidak merespon dan mengisi pesan survei SPIU.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak untuk mengedukasi tentang SPIU.
b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap surat tugas yang dilaksanakan oleh pegawai juga menginformasikan kepada wajib pajak tentang larangan pemberian gratifikasi dan edukasi tentang pengisian SPIU.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Senantiasa memperbarui *database* wajib pajak.
b. Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan penuh integritas.
c. menyampaikan longlist responden wajib pajak kepada KITSDA dan sebelumnya memastikan kebenaran data wajib pajak tersebut.
d. menghubungi wajib pajak untuk mengisi survei
e. memantau jumlah wajib pajak yang telah melakukan pengisian survei
f. memastikan wajib pajak responden telah mengisi survei

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

  a. Risiko terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam mengisi survei dimitigasi dengan senantiasa memantau monitoring pengisian survei yang difasilitasi oleh KITSDA serta menghubungi wajib pajak untuk mengisi survei.
  b. Risiko terhadap hasil survei yang tidak bagus dimitigasi dengan senatiasa memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tuntas.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain pertama, data wajib pajak (email dan nomor hp) belum diperbarui sehingga data yang diberikan sebagai longlist responden tidak valid. Hal ini mengakibatkan pesan survei tidak diterima oleh wajib pajak yang dipilih sebagai responden. Kedua, wajib pajak tidak merespon dan mengisi survei walaupun sudah menerima pesan survei. Ketiga, wajib pajak mengisi survei dengan asal-asalan sehingga hasil survei tidak maksimal.

6. Rencana Aksi Selanjutnya

09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	30,32%	52,97%	52,97%	88,49%	88,49%	100%	100%
Capaian	131,83%	112,70%	112,70%	120,00%	120,00%	111%	111%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Dengan catatan, indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi

Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan
   1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
   2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
   3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

   Penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

   - rencana aksi 1 → 2/10 = 20%
   - rencana aksi 2 → 0/3 = 0%
   - rencana aksi 3 → 8/30 = 26%
   - rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

     = (20%+0%+26%+100%) : 4 = 36%, sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

   Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah:

   = Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= (17,1/100)*100% = 17,1%

- Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, didapatkan bahwa realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 100 dan capaian 111,11%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini tidak tercantum dalam komponen IKU pada Renja maupun Renstra.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, tidak terdapat nama IKU yang sama dengan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Pratama Bengkulu Dua.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain menyampaikan piagam manajemen risiko, dokumen pendukung, dan laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan tepat waktu. Kemudian senantiasa melaksanakan rapat pemantauan manajemen risiko yang terintegrasi dengan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap triwulan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
     1) Senantiasa memantau hasil capaian kinerja setiap bulan untuk memastikan Tingkat risiko masih dibatas aman
     2) Senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan bertujuan untuk menunjang pekerjaan
     3) Selalu menyampaikan imbauan manajemen kinerja setiap triwulan
  b. Pendorong penurunan kinerja
     1) Realisasi manajemen risiko bergantung pada tercapainya IKU yang ada pada dokumen risiko

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

  Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Mengoptimalkan penggunaan grup whatsapp kantor untuk menyampaikan imbauan manajemen kinerja selain dengan menyampaikannya secara langsung dalam pertemuan (misal, motivasi bulanan).
  b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap kegiatan, surat tugas, dan surat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai bertujuan untuk menunjang capaian hasil pekerjaan yang lebih baik.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. senantiasa memantau hasil capaian kinerja dan segera membuat adendum manajemen risiko saat diperlukan
b. melaksanakan rapat pemantauan risiko yang terintegrasi dengan DKRO setiap triwulan
c. melaporkan pemantauan manajemen risiko melalui aplikasi periskop tepat waktu
d. selalu menyampaikan imbauan manajemen kinerja setiap triwulan kepada seluruh pegawai
e. melaksanakan DKRO secara efektif

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap ketidapatuhan pegawai dalam mengisi hasil capaian kinerja setiap triwulan dimitigasi dengan mengirimkan reminder secara berkala melalui grup whatsapp kantor dan pemantauan terhadap pegawai yang belum mengisi realisasi capaian kinerja.
b. Risiko terhadap realisasi capaian kinerja yang tidak optimal dimitigasi dengan kontribusi aktif dari atasan langsung untuk memantau *progress* pekerjaan pegawai.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain realisasi manajemen risiko bergantung pada tercapainya IKU yang ada pada dokumen risiko.

6. Rencana Aksi Selanjutnya

a. Menyelenggarakan rapat manajemen risiko di awal tahun untuk menetapkan risiko kantor
b. membuat piagam MR beserta dokumen pendukung di awal tahun tepat waktu
c. Mengingatkan dan memastikan seluruh pegawai untuk senantiasa menginput realisasi capaian kinerjanya setiap triwulan

d. Mengingatkan dan memastikan seluruh pegawai untuk menetapkan HEK dan DEK, membuat IPR, serta membuat kontrak kinerja tahun 2025

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105,00%	105,00%	105,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	105,00%	105,00%	105,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Q4 KPP Pratama Bengkulu Dua

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

  Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  a. Formula triwulan I dan II:

     Realisasi IKPA/95,0

  b. Formula triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

  c. Formula triwulan IV

     (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

  Berdasarkan Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024, didapatkan bahwa realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% dan capaian 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,23%	95,50%	96,46%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

   Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada Renstra/Renja adalah 100% pada 2024 dan 2023 sama halnya dengan target di KPP Pratama Bengkulu Dua.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

   Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun Kinerja 2023, capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran DJP adalah 93,97% dengan capaian 98,03. Sementara di KPP Pratama Bengkulu Dua, realisasi IKU ini adalah 120% dengan capaian 120.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain pertama, selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) maupun revisi penambahan pagu anggaran pada tingkat DJA. Kedua, mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan yaitu revisi pertama.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
   1) Disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker, serta melakukan pengelolaan dana UP dan TUP secara cermat dan benar.
   2) Melakukan pembayaran atas tagihan yang telah terverifikasi sesegara mungkin guna menghindari adanya penumpukan, yaitu dengan cara melakukan pembayaran tidak melebihi dari 17 hari semenjak SPBY dari PPK
b. Pendorong penurunan kinerja
   1) Penyusunan anggaran kurang baik sehingga penyerapannya pun tidak optimal

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan tidak menunda segala pembayaran yang telah divalidasi kebenarannya.
b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap kegiatan, surat tugas, dan surat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai bertujuan untuk menunjang capaian hasil pekerjaan yang lebih baik.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan pematangan data penyusunan anggaran pada triwulan berikutnya dengan mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya, dan membuat rincian serta rencana kerja dan belanja selama triwulan yang telah dilaksanakan.

b. Melakukan Pengecekan ulang terhadap kelengkapan data supplier sebelum terbit spm untuk menghindari adanya retur SP2D.

c. mempercpat penyerapan anggaran dengan segera mendaftarkan kontrak yang sudah ditandatangani serta memverifikasi tagihan yang diajukan untuk segera dilakukan pembayaran paling lambat 5 hari kerja dari diterima tagihan secara lengkap.

d. Melakukan Pergeseran anggaran pada Belanja modal konstruksi apabila terdapat sisa anggaran berdasarkan hasil tender.

e. Melakukan monitoring berkala tiap minggu mengenai sisa anggaran perjalanan dinas dan lembur.

f. Melaporkan realisasi kinerja satker pada aplikasi sakti dan capaian output pada monitoring Bappenas paling lambat 5 hari kerja setiap bulan.

g. Melakukan revisi anggaran kewenangan DJPB untuk memenuhi kebutuhan sewa kendaraan KPP Pratama Bengkulu Dua serta kebutuhan operasional lainnya.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut.

a. Risiko terhadap penyerapan anggaran yang kurang optimal dimitigasi dengan melakukan pematangan data penyusunan anggaran, menyegerakan pembayaran, serta membuat monitoring berkala terkait penyerapan anggaran.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain dana yang terserap tidak optimal dan tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun, keterbatasan dana, dan aplikasi untuk pencairan dana yang terkadang *error*.

6. Rencana Aksi Selanjutnya

a. Melakukan penyusunan anggaran dengan mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya dan membuat rincian serta rencana kerja dan belanja selama tahun yang telah dilaksanakan.

b. Melakukan Pengecekan ulang terhadap kelengkapan data supplier sebelum terbit spm untuk menghindari adanya retur SP2D.

c. mempercepat penyerapan anggaran dengan segera mendaftarkan kontrak yang sudah ditandatangani serta memverifikasi tagihan yang diajukan untuk segera dilakukan pembayaran paling lambat 5 hari kerja dari diterima tagihan secara lengkap.

B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Berikut adalah rincian realisasi anggaran KPP Pratama Bengkulu Dua.

Pagu Revisi Desember	Pagu	Realisasi
CC.4791Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 663.409.000	Rp 642.989.947
CC.4792Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 251.139.000	Rp 230.148.465
CC.4794Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 317.271.000	Rp 305.103.010
WA.4707Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.029.632.000	Rp 4.934.723.528
WA.4708Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.021.517.000	Rp 1.019.077.000
Total	Rp 7.282.968.000	Rp 7.132.041.950

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam KPP Pratama Bengkulu Dua, khususnya dalam konteks penerimaan pajak negara tahun 2024:

a. Efisiensi Anggara

- **Penggunaan Dana yang Tepat Sasaran:** Memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal pada peningkatan penerimaan pajak. Ini melibatkan perencanaan yang matang, alokasi yang bijak, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap program atau kegiatan.
- **Penghematan Biaya Operasional:** Mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dipangkas tanpa mengganggu kinerja. Contohnya, mengurangi penggunaan kertas dengan digitalisasi, menegosiasikan harga yang lebih baik dengan vendor, atau mengoptimalkan penggunaan energi.
- **Prioritasi Anggaran:** Memfokuskan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang paling strategis dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini mungkin melibatkan pengurangan atau penundaan kegiatan yang kurang penting.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

- **Peningkatan Kompetensi:** Investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efisien dan efektif.
- **Motivasi dan Keterlibatan:** Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi staf untuk memberikan yang terbaik. Ini dapat mencakup pemberian penghargaan atas kinerja yang baik, memberikan kesempatan untuk berkembang, dan memastikan komunikasi yang terbuka dan transparan.

c. Efisiensi Organisasi

- **Proses yang Efektif:** Menganalisis dan memperbaiki proses kerja untuk menghilangkan hambatan dan memastikan alur kerja yang lancar.
- **Koordinasi yang Baik:** Memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik antar departemen dan unit kerja untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama.

d. Efisiensi Teknologi Informasi

- **Integrasi Sistem:** Mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk menghindari duplikasi data dan memastikan informasi tersedia secara real-time.
- **Keamanan Informasi:** Melindungi informasi organisasi dari ancaman keamanan siber.
- **Pelatihan TI:** Memberikan pelatihan kepada staf tentang cara menggunakan teknologi informasi yang tersedia secara efektif.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Pratama Bengkulu Dua juga mendapatkan keberhasilan antara lain Kantor Pelayanan Terbaik ke-II se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Peringkat II Unit Kerja KPP dengan Penyuluhan Terbaik se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Unit Kerja KPP dengan Layanan di Luar Kantor (*extra miles*) terbanyak II se-Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, KPP dengan Employee Advocacy Terproduktif III, KPP dengan Penyelesaian Kegiatan Pengamatan Terbaik III, dan Nilai Kinerja Organisasi 108,97% pada tahun 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tim Unit Kepatuhan Internal KPP Pratama Bengkulu Dua senantiasa melaksanakan kegiatan Pemantauan Kepatuhan terhadap Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan hasilnya tidak ada ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Bengkulu Dua. Seluruh pegawai senantiasa bekerja sesuai dengan SOP dan mematuhi aturan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua untuk tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada seluruh pegawai. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 di KPP Pratama Bengkulu Dua. Terdapat sasaran indikator berupa IKU yang nilai capaiannya diatas target, akan tetapi ada pula IKU yang capaiannya dibawah target yang ditentukan yaitu IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bengkulu Dua tahun 2024 sebesar 108.97%**.** Angka tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas hasil kinerja yang telah dicapai dan diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja seluruh pegawai KPP Pratama Bengkulu Dua dalam upaya perbaikan berkesinambungan sehingga pada periode mendatang dapat memberikan hasil sasaran dan tujuan yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi untuk selanjutnya dapat menjadi tolok ukur kemajuan menuju Kantor Pelayanan Pajak yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/WPJ.28/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

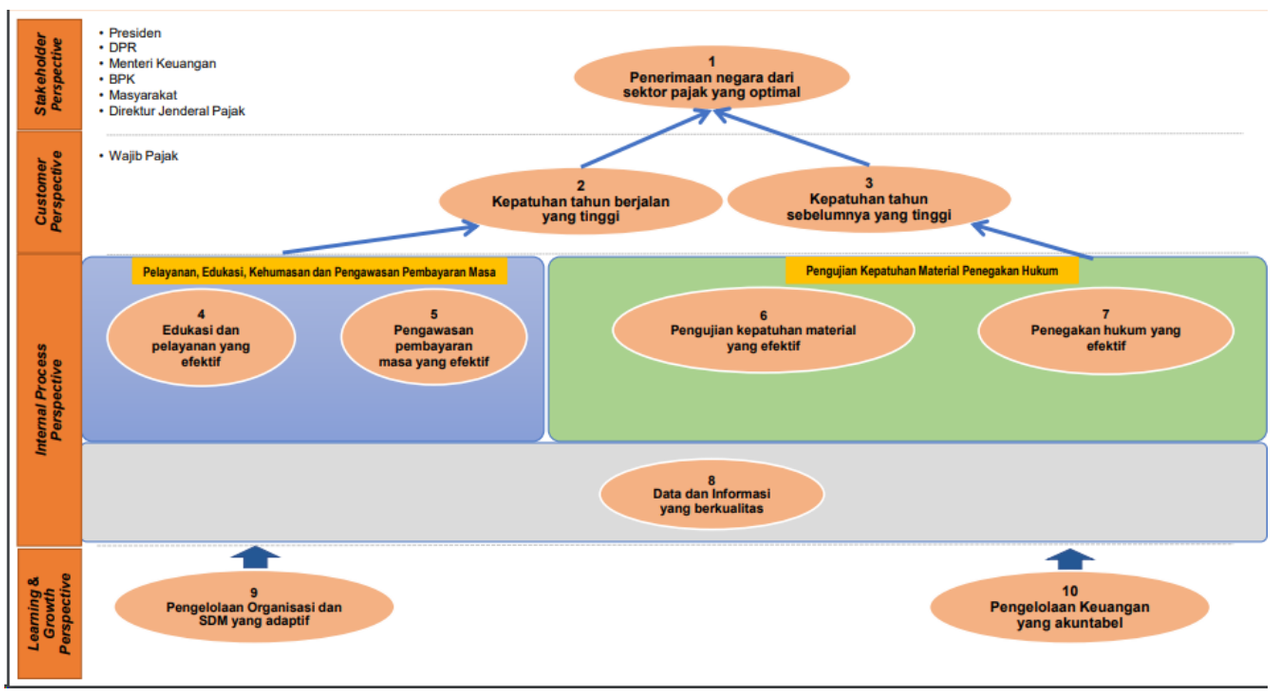

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	**Rp**	**1,338,784,000**
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	726,731,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	243,639,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	368,414,000
B.Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**5,890,349,000**
4.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4,868,832,000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1,021,517,000
Total	**Rp**	**7,229,133,000**

Bengkulu, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung,

Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Indera Gunawan

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Bengkulu, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bengkulu Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Indera Gunawan

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Terlaksanany a kegiatan pelaksanaan edukasi perpajakan tema III terhadap Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	DSPT yang telah dilakukan edukasi perpajakan melakukan perubahan perilaku lapor dan perilaku bayar sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi perpajakan atas Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	**Q1 sampai dengan Q4:** Kegiatan edukasi perpajakan tema III terlaksana dengan perubahan perilaku lapor dan bayar	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	Rp 49.164.000
2	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan Pembayaran masa yang Optimal	Tercapainya pembayaran masa yang efektif dan kepatuhan	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP WP Strategis dan Wilayah yang	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Optimalisasi pengawasan pembayaran masa	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I-VI	Rp 451.590.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			pembayaran pajak	datanya diturunkan oleh Kantor Pusat DJP 2. Melakukan Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching) tertentu yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJP 3. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut penyelesaian data dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 yang datanya diturunkan oleh Kantor Pusat DJP. 4. Laporan bulanan /Monitoring Capaian IKU pengawasan pembayaran masa WP Strategis dan wilayah	2. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak 3. Peningkatan jumlah penerbitan STP 4. Peningkatan jumlah data yang ditindaklanjuti			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	Melakukan *coaching* terhadap *Account Representative* (AR) Strategis yang melakukan closing LHP2DK tanpa realisasi (dengan nilai tertentu) Pelaksanaan pengawasan dan Asistensi terhadap *Account Representative* (AR) baik langsung maupun tertulis	LHP2DK yang berkualitas dan menghasilkan penerimaan pajak Meningkatkan Pengawasan yang dilakukan Account Representative (AR) dan mengoptimalisasi penerimaan pajak	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Melakukan pengawasan atas LHP2DK tanpa realisasi melalui aplikasi *Approweb* dan aplikasi lainnya; 2. Melakukan *coaching* terhadap AR Strategis dan wilayah dengan LHP2DK closing tanpa realisasi 3. Melakukan pengawasan kinerja Account Representative (AR) pada aplikasi Mandor dan Approweb	**Q1 sampai dengan Q4:** SP2DK, LHPt, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I-VI	Rp 196.891.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		secara triwulanan						
4	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Optimalisasi pemanafaatan data selain tahun berjalan dengan melakukan penerbitan STP dan matching data	Data selain tahun berjalan dimanfaatkan 100%	**Q1 sampai dengan Q4:** Penerbitan STP dan tindak lanjut data matching	**Q1 sampai dengan Q4:** STP, SP2DK, LHPt, Realisasi pembayaran oleh WP	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I-VI	Rp 529.840.000
5	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Pengamanan penyelesaian pemeriksaan berkualitas dan tepat waktu	Tercapainya realisasi penyelesaian pemeriksaan berkualitas dan tepat waktu	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Menyelesaikan sisa tunggakan pemeriksaan 2. Melakukan percepatan penyelesaian dan menjalankan prosedur pemeriksaan tepat waktu	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Penyelesaian LHP 2. Menghasilkan produk pemeriksaan yang berkualitas 3. Meminimalkan upaya hukum atas hasil ketetapan	Januari s.d. Desember 2024	Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp 66.150.000
6	Tingkat Efektivitas Penagihan	Meningkatkan capaian Tingkat Efektivitas Penagihan	Tercapainya tingkat efektivitas pengihan	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Meningkatkan capaian tingkat efektivitas penagihan dengan	**Q1 sampai dengan Q4:** Meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp 94.621.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				memperbanyak wajib pajak yang masuk ke dalam daftar sasaran				
7	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pelaksanaan Pengamatan dan KPDL yang berkualitas	Laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai 100%	**Q1 sampai dengan Q4:** penugasan dan penyelesaian kegiatan pengamatan dan KPDL	**Q1 sampai dengan Q4**: Laporan Pengamatan dan KPDL	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I-VI, Kepala KP2KP	Rp 207.643.000

8	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	- Meningkatkan jumlah pejabat struktural dengan nilai Assesment diatas JPM (80) - Meningkatkan jumlah pejabat fungsional dan Pelaksana yang lulus ujian kompetensi - Meningkatkan Kualitas Iman dan Mental SDM	Pegawai memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya Pegawai memiliki iman dan mental yang baik	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Memetakan nilai dan mengajukan Assesment ulang bagi pejabat struktural yang nilainya di bawah JPM (80) 2. Melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap pejabat yang melakukan assesment. 3. Melakukan bimbingan persiapan bagi pejabat fungsional dan Pelaksana yang akan melakukan ujian kompetensi 4. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi kepada pegawai baik secara klasikal maupun non klasikal 5. Melaksanakan kegiatan bina iman	**Q1 sampai dengan Q4:** 1. Terpantaunya nilai Assessment pejabat structural 2. Tercapainya nilai Assesment pejabat struktural diatas JPM (80) 3. SDM Pegawai berkompeten	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp 54.000.000

				dan mental pegawai secara berkesinambungan				

Bengkulu, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Indera Gunawan

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Indera Gunawan	NAMA	Tri Bowo
NIP	197201111992011001	NIP	197004061995031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Indera Gunawan

197201111992011001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Tri Bowo

197004061995031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	98 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

	16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
	17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Indera Gunawan

197201111992011001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Tri Bowo

197004061995031001